



2019

SEKOLAH BERASRAMA

**PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PENDIDIKAN SERTA PENGUATAN
INTEGRASI SOSIAL KEBANGSAAN
DI PROVINSI PAPUA**

SEKOLAH BERASRAMA:

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan serta
Penguatan Integrasi Sosial Kebangsaan
di Provinsi Papua



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019

Sekolah Berasrama: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan serta Penguatan Integrasi Sosial Kebangsaan di Provinsi Papua

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Tim Penyusun

Unggul Sudrajat, Iskandar Agung, Genardi Atmadiredja, Yaya Jakaria, Mulyadi, Sumiyati

Penyunting Isi

Muktiono Waspodo, Mulyadi, Irsyad Zamjani

Penyunting Bahasa

Sugih Biantoro, Imelda Widjaja

Desain sampul dan isi

Genardi Atmadiredja

iv + 103 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-0792-54-5

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <http://puslitjakdibud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdibud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah selesainya laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus menyambut baik atas terselesaikannya penulisan laporan penelitian tentang “Kajian Sekolah Berasrama untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan serta Memperkuat Integrasi Sosial Kebangsaan di Provinsi Papua”. Penelitian ini sangat berguna dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada di Provinsi Papua khususnya dalam rangka menjawab soal pendidikan.

Pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan dan memajukan harkat masyarakat Papua. Melalui penelitian ini, kami melihat bahwa konsep sekolah berpola asrama merupakan jawaban atas persoalan akses dan mutu pendidikan yang ada di Papua. Untuk itu, dalam kesempatan ini, selaku Kepala Puslitjakdikbud saya menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti atas kerja kerasnya sehingga penelitian dan penulisan laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Saya kira hasil penelitian ini masih memerlukan banyak masukan dari semua pihak karena berbagai kekurangan yang ada. Namun, kiranya penelitian dan penulisan ini

dapat berguna bagi semua pihak, baik perumus kebijakan maupun masyarakat.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by a smaller 'W'.

Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua saat ini masih rendah dan tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tahun 2016, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Papua hanya sebesar 6,15 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 6,15 tahun masa sekolah, atau sudah menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun. Kondisi ini tentu masih jauh di bawah target nasional wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, Angka Melek Huruf (AMH) di Papua hanya sebesar 71,02 persen, yang berarti dari setiap 100 penduduk Papua usia 15 tahun ke atas hanya terdapat 71-72 orang yang mampu membaca dan menulis. Angka ini juga masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud, yaitu sebesar 96,10 persen (BPS Provinsi Papua, 2016).

Rendahnya pencapaian pembangunan pendidikan tersebut berdampak pada rendahnya daya saing siswa lulusan Papua untuk berkompetisi dalam dunia kerja atau untuk mendapatkan pendidikan tinggi di luar Papua. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang jelas antara daerah Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Apabila dibiarkan berlarut-larut hal ini sangat rawan menimbulkan kecemburuan sosial. Munculnya konflik sosial horizontal yang acap kali terjadi di tanah Papua, gerakan separatisme dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) disinyalir

merupakan akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi, fisik, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, pencapaian pembangunan pendidikan harus bisa terlaksana di Papua. Pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua harus bisa menjadi lebih baik dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu solusinya adalah pendirian sekolah berasrama untuk meningkatkan kualitas akses dan mutu pendidikan di Papua. Di sekolah berasrama, para siswa dapat melakukan interaksi intensif dengan sesama siswa dan para guru, sehingga penyampaian pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik bisa berlangsung dengan baik.

Dengan demikian, pembentukan karakter kebangsaan Indonesia bisa tertanam kuat pada diri siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah suatu penelitian tentang sekolah berasrama yang bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan sekolah berasrama dalam upaya peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan penanaman nilai karakter peserta didik secara berkesinambungan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode.....	10
E. Hasil yang Diharapkan.....	10
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Pikir.....	15
C. Kajian Teoritis	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data.....	37
C. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Selayang Pandang Provinsi Papua	41
B. Kondisi Sekolah Berasrama di Papua.....	67
C. Sekolah Berasrama sebagai Media Integrasi Kebangsaan	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99

B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji peran sekolah berasrama dalam peningkatan kualitas akses dan mutu pendidikan serta penguatan integrasi sosial kebangsaan di Provinsi Papua. Keterbatasan akses dan rendahnya mutu pendidikan, telah membuat pembangunan pendidikan di Papua jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain Indonesia. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, keberadaan sekolah berasrama sangat diperlukan. Pendidikan sekolah berasrama merupakan perpaduan antara pendidikan yang dilakukan di sekolah dan di asrama, di mana siswa menjalani proses belajar dan bermain di sekolah, lalu pulang dari sekolah mereka akan belajar dan tinggal di asrama dengan para pengasuh yang berfungsi sebagai guru dan orang tua. Melalui pendidikan berasrama ini, anak-anak akan dididik dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung, kontinu, dan mendalam. Dengan demikian, kualitas dan kuantitas pendidikan anak-anak di Provinsi Papua bisa meningkat.

Keberhasilan pembangunan pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi diri,

meningkatkan kemampuan dalam mengatasi hambatan, dan memperluas berbagai pilihan serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan beberapa kewajiban, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan tersebut juga tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 (Amandemen IV), ayat pertama yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya terlihat melalui berbagai program pendidikan seperti Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR) pada tahun 1994 dan Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015-2019.

Salah satu tujuan strategis program pendidikan yang tercantum dalam Renstra Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan berkebutuhan khusus. Terwujudnya tujuan tersebut ditandai dengan tercapainya sasaran strategis, seperti (a)

meningkatnya angka partisipasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; (b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar-kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar-daerah.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Berdasarkan Renstra Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, peningkatan mutu pendidikan tersebut bisa diwujudkan dengan tercapainya sasaran strategis, seperti (a) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; (b) meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar; (c) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; dan (d) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tujuan strategis yang berkaitan dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan sebagaimana digambarkan pada Renstra Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 di atas telah menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Mencermati kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita (Sembilan cita) serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat.

Secara nasional pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah telah membuahkan hasil berupa peningkatan partisipasi pendidikan. Kondisi itu bisa dilihat melalui beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2015 APK pendidikan menengah atas (SMA) Indonesia cenderung meningkat menjadi 79,02 persen, dari tahun sebelumnya 75,53 persen. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun ini mencapai 100,72 persen, dan sekolah dasar (SD) 108,00 persen. Sementara indeks Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 15-24 tahun melek huruf dengan persentase 99,7 persen. Pada usia 25-44 tahun persentase melek huruf meningkat dari 98,3 persen menjadi 98,5 persen. Begitu juga dengan kelompok usia 45 tahun ke atas persentase angka melek huruf meningkat dari 87,8 persen menjadi 88,1 persen. Selain itu, dari total guru yang diangkat sampai tahun 2005 sebanyak 1,7 juta guru, di tahun 2015 sudah 1,63 juta guru sudah tersertifikasi, atau sekitar 93,3 persen sudah tersertifikasi (Purwoko dkk, 2017: 2-3)

Namun demikian, keberhasilan pemerintah tersebut tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan pencapaian pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang majemuk, Indonesia memiliki kondisi geografis dan budaya masyarakat yang beraneka ragam. Kondisi ini seringkali menjadi kendala dalam pencapaian pembangunan pendidikan, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2015 di Provinsi Papua yang hanya mencapai 66,97 persen

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencapai 73,59 persen dan Sekolah Dasar (SD) 95,15 persen (BPS Provinsi Papua, 2016). Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut masih rendah dan tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Secara umum setidaknya terdapat dua permasalahan besar di bidang pendidikan di Papua. Permasalahan pertama adalah relatif rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di Provinsi Papua. Persoalan kedua adalah rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan (Utama dkk, 2017: 2-3).

Permasalahan kualitas pendidikan di Provinsi Papua terlihat pada dimensi proses maupun hasil pendidikan. Pada dimensi proses, rendahnya kualitas pendidikan terlihat dari jumlah jam belajar yang terbatas di sekolah, serta materi pembelajaran yang tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat atau kebutuhan daerah. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh rendahnya komitmen dan kapasitas dari tenaga pendidik. Hal ini terlihat dari banyak tenaga pendidik yang meninggalkan tugas mengajar dan bahkan tidak berada di tempat tugas dalam waktu yang lama. Selain itu, banyak tenaga pendidik yang tidak memiliki kemampuan mengajar yang baik. Bahkan, banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan untuk menjadi tenaga pengajar. Pada dimensi hasil, rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Papua terlihat dari masih banyak siswa yang belum menguasai kemampuan dasar, seperti membaca, menulis dan berhitung. Kesiapan lulusan sekolah untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah juga masih rendah (Utama dkk, 2017: 11-12).

Sementara permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya akses mendapatkan pelayanan pendidikan di Provinsi Papua terlihat pada dua hal. Pertama akses secara fisik, berupa jarak yang cukup jauh antara sekolah dengan pemukiman penduduk. Selain itu, kondisi jalan dan ketersediaan sarana transportasi juga kurang memadai. Kedua, akses ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, ketersediaan guru, peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar, perpustakaan serta tempat tinggal guru yang kurang memadai (Purwoko dkk, 2017: 3-4).

Diperlukan strategi kebijakan untuk segera mengatasi persoalan-persoalan pendidikan seperti diuraikan di atas. Nawacita ke-3 mengamanatkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua harus bisa menjadi lebih baik dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Apabila dibiarkan berlarut-larut hal tersebut sangat rawan menimbulkan kecemburuan sosial. Munculnya konflik sosial horizontal yang acap kali terjadi di tanah Papua, gerakan separatisme dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) disinyalir merupakan akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi, fisik, kesehatan, pendidikan di Papua.

Dengan luas wilayah 421.981 km² (3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa), Papua merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti bahan tambang emas, tembaga, perak, gas alam, minyak bumi, batu bara, dan kekayaan hutan, serta hasil laut. Bahkan, di sinilah tersimpan cadangan emas terbesar dan cadangan tembaga urutan kedua di dunia. Melalui kekayaan alam ini Provinsi Papua telah berkontribusi besar bagi

pemasukan kas keuangan negara Indonesia. Akan tetapi, kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan kualitas hidup masyarakatnya, di mana menurut hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih sangat tertinggal dibandingkan dengan IPM di daerah-daerah Indonesia lainnya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Nenobais, 2012: 1).

Dalam sektor bisnis, keterlibatan penduduk asli Papua sangat rendah dan hampir semua pengusaha adalah migran. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan perekonomian tidak mencerminkan keadilan distribusi, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar. Ketidakadilan kesempatan berakar dari prasangka dan rasisme yang diakibatkan oleh penduduk asli Papua yang diposisikan sebagai inferior seperti yang terdokumentasi dalam gagasan-gagasan dasar yang menjadi latar belakang perumusan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua dalam bentuk wilayah dengan pemerintahan sendiri pada tahun 2001.

Papua dimasukkan ke dalam daerah dengan angka indeks kemiskinan yang tinggi dan daerah yang mempunyai tingkat perbedaan yang tinggi dengan Jakarta. Tantangan-tantangan yang berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin, tetapi juga besarnya perbedaan antar-daerah. Jakarta dan Papua menggambarkan perbedaan besar antardaerah: di Jakarta, hanya 3,4 persen dari total penduduk yang miskin, sementara sekitar separuh penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Analisa obyektif mengatakan bahwa kemiskinan yang ada di Papua adalah hasil dari pemiskinan struktural yang disebabkan oleh

kurangnya kesempatan bagi orang-orang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Sugandi, 2008: 5).

Dengan demikian, pencapaian pembangunan pendidikan harus bisa terlaksana di Papua. Sekolah berasrama merupakan salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan pencapaian pembangunan pendidikan di Papua. Regulasi mengenai sekolah berasrama sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006. Peraturan daerah ini membuka peluang bagi kabupaten-kabupaten di Papua untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kapasitas yang dimiliki kabupaten. Salah satu pasal dalam peraturan daerah tersebut juga menyatakan bahwa daerah-daerah di Papua dapat menyelenggarakan sekolah berasrama untuk meningkatkan kualitas peserta didik dengan pembiayaan yang berasal dari pemerintah maupun swasta.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Salah satunya adalah pengembangan pelayanan dasar sekolah berpola asrama dan pelayanan kesehatan jarak jauh (*telemedicine*) di Papua. Kerja sama dengan sejumlah pihak ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua. Pihak yang diajak bekerja sama adalah *Indonesia American Society of Academics* (IASA), yaitu para akademisi diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Adapun dalam pengembangan sekolah berasrama yang akan dilakukan berada di

Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Nabire (Aprillia, 2018).

Konsep sekolah berasrama yang mirip dengan *boarding school* diharapkan mampu mengatasi permasalahan berkaitan dengan keterbatasan akses dan mutu pendidikan, sebab sistem sekolah berasrama mengharuskan peserta didik, para guru, dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Di sekolah berasrama, para siswa dapat melakukan interaksi intensif dengan sesama siswa dan para guru, sehingga penyampaian pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik bisa berlangsung dengan baik. Dengan demikian, pembentukan karakter kebangsaan Indonesia bisa tertanam kuat pada diri siswa. Hal ini menjadi modal penting bagi penguatan semangat integrasi sosial kebangsaan Indonesia pada generasi muda di Papua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan utama dalam riset ini adalah Bagaimana Sekolah Berasrama dapat Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan serta Menguatkan Integrasi Sosial Kebangsaan di Provinsi Papua? Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi sekolah berasrama yang ada di Papua saat ini?
2. Bagaimana strategi pengelolaan sekolah berasrama yang dapat mendukung peningkatan kualitas akses dan mutu pendidikan serta menjadi wahana integrasi sosial kebangsaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi sekolah berasrama di Provinsi Papua.
2. Menyusun strategi yang sesuai bagi pembentukan sekolah berasrama dalam mendukung peningkatan kualitas akses dan mutu pendidikan serta menjadi wahana integrasi sosial kebangsaan di Provinsi Papua.

D. Metode

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah pengelolaan sekolah berasrama dalam upaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta menguatkan integrasi kebangsaan di Provinsi Papua. Keberadaan sekolah berasrama diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait rendahnya akses dan mutu pendidikan di Provinsi Papua. Sementara penguatan integrasi sosial dan kebangsaan diharapkan mampu memperkuat rasa soliditas sebagai satu kesatuan suku bangsa Papua, serta memperkuat nasionalisme dan persatuan para pemuda/pemudi Papua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup spasial dari penelitian ini adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Nabire di Provinsi Papua.

E. Hasil yang Diharapkan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa nilai dan capaian pengelolaan sekolah berasrama yang dapat digunakan sebagai:

1. Rekomendasi kebijakan berupa konsep ideal pengelolaan sekolah berasrama dalam rangka meningkatkan akses dan

mutu serta menguatkan integrasi sosial kebangsaan di Provinsi Papua.

2. Landasan pemikiran bagi pemerintah, masyarakat dan pemerhati pendidikan di Papua terkait kebijakan pengelolaan sekolah berasrama;
3. Rujukan semua pihak, DPR, pemerintah, serta pihak-pihak terkait kebijakan pengelolaan sekolah berasrama.

Kegiatan mengumpulkan makanan bersama di
Asrama Muko



BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Sekolah berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Salah satu tujuannya adalah agar anak memperoleh pendidikan secara berkesinambungan dengan mencontoh langsung praktik baik pendidikan dari para guru dan pembimbing (aspek keteladanan). Adanya program sekolah berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multibudaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya (Perdana dkk, 2017: 9-10).

Literatur yang secara khusus membahas tentang peran sekolah berasrama sebagai penguat integrasi sosial kebangsaan di Papua sejauh ini belum ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa literatur hasil kajian penelitian terdahulu tentang perkembangan pendidikan di Provinsi Papua secara umum, antara lain penelitian tentang Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Puslitjaldikbud pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian pembangunan pendidikan di

Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditinjau dari sisi peningkatan akses dan mutu pendidikan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut masih rendah dan tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) UGM dengan judul Studi Pengembangan Pendidikan Berpola Asrama Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menakar kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa aspek agar dapat mengimplementasikan program Sekolah Berpola Asrama. Hasilnya menunjukkan bahwa skema pengembangan pendidikan berpola asrama di Kabupaten Intan Jaya terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu perencanaan, pengembangan, serta peningkatan kualitas dan daya saing. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah berpola asrama agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, maka prinsip keterlibatan multi-pihak harus diperhatikan.

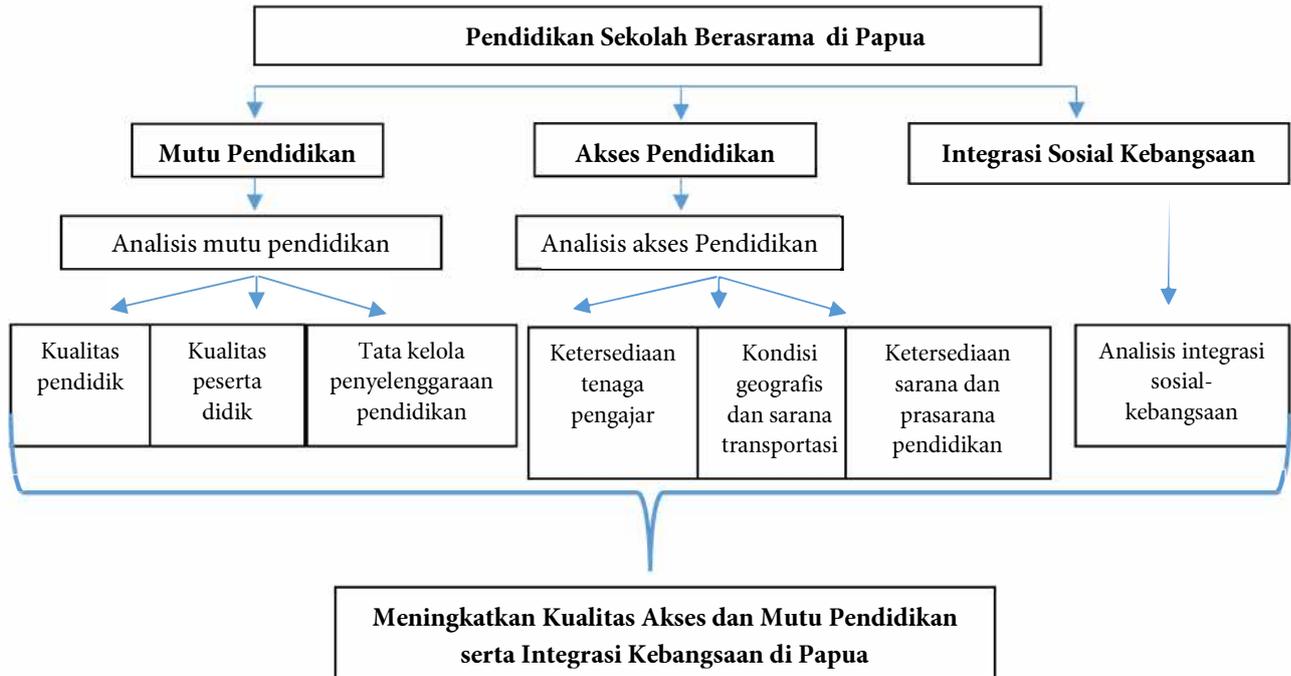
Dalam hal ini perlu melakukan adaptasi dan akomodasi keragaman masyarakat, baik dalam pengembangan sekolah berpola asrama yang sudah ada, maupun pembangunan sekolah berpola asrama di lokasi baru, terutama menyangkut keberagaman suku dan agama. Jaringan multi-pihak perlu terus diekstensi seluas-luasnya, tidak hanya pihak Pemda Intan Jaya, Masyarakat, dan

Yayasan melainkan juga pihak-pihak lain di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Penelitian selanjutnya yang terkait pendidikan berbasis asrama di Papua adalah penelitian yang dilakukan oleh Harry Nenobais pada tahun 2012, dengan judul Pengembangan Pendidikan Berbasis Asrama di Pedalaman Papua. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan berpola asrama sejak TK sampai SMA ternyata lebih efektif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan anak-anak pedalaman Papua. Melalui pendidikan pola asrama ini, anak-anak diajar, dididik, dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung, kontinu, dan mendalam oleh para pengasuh asrama dan guru, sehingga perkembangan kualitas hidup anak-anak mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan pola asrama diperlukan kemitraan yang baik antara yayasan, pemerintah daerah, tokoh adat/agama, dan swasta.

B. Kerangka Pikir

Secara garis besar, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterjemahkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

C. Kajian Teoritis

1. Pentingnya Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sementara menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara sederhana pendidikan bisa dimaknai sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani dan rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bersifat kontinu, berisi konstruksi dan rekonstruksi dari pengalaman hidup seseorang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis, yang membuat siswa lebih efektif dalam menghadapi dan memecahkan problem dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan merupakan modal penting bagi pembangunan manusia untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi capaian pendidikan suatu wilayah, maka semakin banyak pekerja yang produktif dan memiliki keterampilan, sehingga dapat meningkatkan output

dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pada tingkatan tertentu capaian pendidikan memiliki dampak yang kuat terhadap hasil pembangunan sosial. Dengan demikian, pembangunan pendidikan haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengusahakan pendidikan yang bisa diakses dan dijangkau oleh semua warga negara melampaui berbagai kendala seperti fisik, mental, jenis kelamin, ekonomi, geografis, dan sosial. Untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia. Di antaranya dengan mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun, mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan memberikan bantuan kepada siswa-siswi SMP dan SMA yang kurang mampu.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan seringkali mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun, pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah

dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti di bidang olah raga, seni atau keterampilan (Yusuf, 2008: 21).

Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, seperti dapat tidaknya lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya bahkan sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang di dalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau negara. Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

Menurut Syaodih, dkk (2006), prinsip-prinsip dalam peningkatan mutu pendidikan, antara lain:

- a. Kepemimpinan yang profesional dalam bidang pendidikan.
- b. Adanya komitmen pada perubahan.
- c. Para profesional pendidikan sebaiknya dapat membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
- d. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika adanya administrator, guru, staf, pengawas sebagai profesional pendidikan mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *team work*, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi.

Sejalan dengan hal tersebut, studi mengenai peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Lockheed dan Levin (1993), menjelaskan bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa aspek seperti: input yang diperlukan (kurikulum, pedoman pembelajaran, waktu pembelajaran yang berkualitas, guru yang mampu mendorong siswa aktif); kondisi yang memfasilitasi (keterlibatan orang tua dan komunitas, komitmen dan akuntabilitas, serta fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan lokal); serta keinginan pemangku kebijakan untuk berubah dan beraksi.

3. Kemudahan Akses dan Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* berarti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sedangkan akses terhadap pendidikan telah adil apabila antarkelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (Eka, 2007).

Sementara itu, Coleman (1966) dalam bukunya *Equality of educational opportunity* menjelaskan bahwa konsep pemerataan meliputi pemerataan aktif dan pasif. Pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya, sedangkan pemerataan pasif merupakan pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah.

Senada dengan hal tersebut, Didi Trisidi (2016) mengungkapkan bahwa pemerataan terhadap akses pendidikan dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang mudah untuk dijangkau tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, sehingga setiap warga masyarakat dapat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar di program pendidikan yang dipilihnya (Utama dkk, 2017: 11-12).

Untuk melihat pencapaian pembangunan pendidikan yang merata, diperlukan indikator-indikator pemerataan pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional memberikan indikator pemerataan pendidikan pada tiga hal, yakni peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APK didasarkan pada persentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, sedangkan APM ditentukan dalam persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan.

Sementara itu, APS adalah jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terpresentasikan pada beberapa satuan pendidikan. Ada indikator utama yang dipahami dalam hal pemerataan pendidikan yakni jumlah sekolah per-penduduk usia sekolah tiap kabupaten/kota dan jumlah guru per-sekolah per-kabupaten/kota. Sebagai perluasan dari indikator-indikator tersebut, perlu ditambahkan beberapa indikator baru, seperti jumlah siswa persekolah, jumlah putus sekolah dan jumlah buta huruf. Namun

demikian, pemerataan ini pun sangat bergantung pada penyediaan anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD.

4. Sekolah Berasrama

Dalam bahasa Inggris, sekolah berasrama sering dikenal sebagai *Boarding School*. Menurut Oxford Dictionary, *Boarding School is school where pupils live during the term*, artinya sekolah berasrama adalah lembaga pendidikan yang siswanya belajar dan tinggal bersama selama kegiatan pembelajaran. Menurut Maksudin (2008), sekolah berasrama adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut.

Sekolah berasrama mengombinasikan tempat tinggal para siswa di institusi sekolah yang jauh dari rumah dan keluarga mereka, dengan pembelajaran agama serta mata pelajaran umum. Oleh karena itu, sistem pendidikan di sekolah berpola asrama merupakan perpaduan antara sistem pendidikan sekolah umum dengan sistem pendidikan pesantren di mana siswa mendapatkan pendidikan selama 24 jam. Model pendidikan ini menawarkan keunggulan yang diukur dari sisi kesiapan peserta didiknya menjadi insan yang beriman dan bertakwa, serta mampu hidup mandiri dalam masyarakat.

a. Bentuk-bentuk Sekolah Berasrama

Di Indonesia, model pendidikan berpola asrama sudah mulai dikembangkan sejak lama. Pada umumnya model ini dikembangkan pada lembaga pendidikan yang berbasis agama, seperti pondok pesantren dan seminari. Pondok pesantren dikembangkan sebagai model pendidikan dalam Agama Islam dan

seminari dikembangkan sebagai model pendidikan dalam Agama Katolik. Selain sekolah berasrama berbasis agama, terdapat pula sekolah umum yang berasrama. Sekolah ini merupakan sistem sekolah reguler dengan tambahan asrama. Lebih lanjut, berikut ini akan diuraikan beberapa bentuk sekolah berasrama di Indonesia.

1) *Pesantren*

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia yang masih bertahan hingga sekarang. Menurut beberapa ahli, pesantren merupakan kelanjutan dari lembaga serupa yang pernah ada pada masa pra Islam. Pesantren berasal dari konsep bahasa Sanskerta, yaitu *shastri* berarti orang yang tahu kitab suci agama Hindu. Sejak abad XV Masehi pesantren telah digunakan sebagai lembaga pengajaran dan penyiaran agama Islam. Materi-materi yang diajarkan dalam pesantren sebagian besar meliputi hukum (syariat) Islam seperti fikih dan tauhid.

Berdasarkan sistem pendidikannya, pesantren bisa dibagi menjadi dua: tradisional dan modern. Pada umumnya pesantren tradisional dimiliki oleh keluarga kiai dan relatif mandiri secara ekonomi. Para kiai membiayai pesantren mereka dari unit produksi yang mereka miliki seperti sawah atau kebun, sumbangan masyarakat sekitar, atau sumbangan orang tua santri. Sistem pendidikan di pesantren tradisional sangat sederhana di mana kiai dan beberapa guru mengajarkan materi yang sangat terbatas, sesuai dengan kitab-kitab atau cabang-cabang keilmuan yang dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu, para santri seringkali berpindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain jika ingin mengaji secara mendalam cabang-cabang keilmuan yang berbeda-beda. Pesantren tradisional juga tidak mengenal sistem kelas karena guru menjadi

sentralnya. Para santri mendatangi guru-guru sesuai dengan materi pelajaran yang menjadi minat mereka.

Menurut Zamakhsyari Dhofier (1994), pengajaran di pesantren tradisional biasanya menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan*. Istilah *sorogan* berasal dari kata *sorog* (Jawa) yang berarti menyodorkan. Oleh karena itu, metode pengajaran *sorogan* mengharuskan para santri menghadap guru atau kiai satu per satu dengan menyodorkan kitab yang akan dipelajarinya. Kiai akan membacakan pelajaran yang terdapat pada kitab dan kemudian menerjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh santri. Metode *sorogan* sangat efektif untuk mendidik santri menjadi seorang ulama. Metode ini memungkinkan kiai mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelajaran.

Adapun metode *bandongan* adalah metode kuliah. Santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah. Selanjutnya, para santri menyimak keterangan yang dibacakan oleh kiai pada kitabnya masing-masing. Metode *bandongan* digunakan dalam pembelajaran yang dihadiri oleh banyak santri. Dalam metode ini, kiai sering kali membaca dan menerjemahkan kitab-kitab dengan bahasa yang cepat dan susah dimengerti. Dengan cara ini kiai dapat menyelesaikan pelajaran kitab hanya dalam beberapa hari. Oleh karena itu, metode *bandongan* biasanya diterapkan pada jenjang pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi yang para santrinya sudah pernah mengikuti metode *sorogan* secara intensif.

Berbeda dari pesantren tradisional, pesantren modern menerapkan sistem pendidikan formal dengan pengajaran berbasis kelas dan memiliki struktur kurikulum yang dikembangkan secara mandiri. Selain memuat berbagai cabang keilmuan agama, kurikulumnya juga memuat mata pelajaran umum. Rekrutmen peserta didik juga dilakukan secara selektif melalui rangkaian tes baik lisan maupun tertulis. Selain itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian dari proses pendidikan di pesantren modern ini.

Berbagai fasilitas olahraga, seni, peningkatan keterampilan, dan kursus bahasa asing disediakan untuk para santri. Seperti halnya pesantren tradisional, pesantren modern juga mandiri secara ekonomi. Beberapa pesantren modern memiliki jenis unit usaha yang lebih banyak dan dikelola secara profesional untuk mendukung proses pendidikan di dalamnya. Para santri dilibatkan dalam pengelolaan berbagai unit usaha tersebut sebagai bagian dari pendidikan kewirausahaan.

2) *Sekolah Umum Berasrama*

Sekolah umum yang menerapkan pola berasrama pertama kali di Indonesia adalah Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1985. Sekolah ini merekrut putra-putri terbaik Indonesia yang diseleksi ketat, baik secara kognitif maupun fisik. Keberadaan LPTTN kemudian menjadi inspirasi bagi lahirnya sekolah-sekolah umum berasrama di Indonesia. Sekolah-sekolah ini didirikan sebagai sarana pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Namun demikian, sekolah-sekolah umum berasrama ini pada perkembangannya bukan hanya sekolah unggulan yang melayani

para peserta didik terbaik. Beberapa yayasan swasta di wilayah-wilayah terpencil juga mengadopsi sistem asrama untuk melayani anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Pemerintah sendiri pada tahun 2000an mulai memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah berasrama di wilayah-wilayah terpencil di kepulauan Nusantara seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sekolah-sekolah berasrama, terutama yang dipersiapkan sebagai sekolah unggulan, memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karakteristik ini muncul dari nilai-nilai inti yang dipedomani dan menjadi identitas sekolah-sekolah berasrama tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, sekolah-sekolah berasrama ini dibedakan melalui tiga karakteristik nilai: keagamaan, ketarunaan, dan keilmuan. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia dikenal sekolah berasrama keagamaan, sekolah berasrama ketarunaan, dan sekolah berasrama sains.

Sekolah berasrama keagamaan merupakan sekolah umum berpola asrama yang mengadopsi nilai-nilai keagamaan dalam membentuk karakter peserta didiknya. Oleh karena itu, sekolah ini biasanya berafiliasi pada agama tertentu dan dimiliki oleh yayasan-yayasan keagamaan seperti Dwi Warna (Islam), Advent (Kristen), dan YPPK Don Bosco (Katolik). Kondisi ini tercermin dalam seleksi peserta didik, mewajibkan pelaksanaan ritual wajib keagamaan, dan pengayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan aktivitas-aktivitas keagamaan.

Sementara itu, sekolah berasrama ketrunaan adalah sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip kemilteran seperti kedisiplinan, keberanian, dan keberanian. Sekolah berasrama jenis ini biasanya merupakan bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan reguler dengan institusi militer. Dalam membentuk karakter peserta didik, sekolah-sekolah ketrunaan mengadopsi beberapa model pelatihan dan budaya militer. Sekolah ketrunaan cukup populer di Indonesia dan merupakan perintis berkembangnya sekolah-sekolah berasrama modern. Beberapa sekolah ketrunaan di Indonesia adalah SMA Taruna Nusantara, Magelang; SMA Krida Nusantara, Bandung; SMA Taruna Nala, Malang; dan SMA Terpadu Wira Bhakti, Bone Bolango.

Berbeda dari kedua sekolah berasrama tersebut, sekolah berasrama sains merupakan sekolah berasrama yang memfokuskan diri pada pendalaman pengajaran keilmuan, dalam hal ini ilmu-ilmu alam dan ilmu pasti. Sekolah ini memfokuskan diri pada pengajaran akademik. Pendalaman materi akademik ini dilakukan bukan hanya di dalam jam belajar normal, namun juga di luar jam-jam normal dan mengambil jam-jam yang biasanya dialokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler.

b. Pembelajaran di Sekolah Berasrama

Pelaksanaan pembelajaran pada sekolah berasrama menggunakan kurikulum terpadu (terintegrasi). Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang memadukan antara kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kurikulum Kementerian Agama, ataupun kurikulum dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan adalah Kurikulum 2013. Kurikulum

ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah berasrama, karena memiliki perangkat yang lengkap. Perangkat Kurikulum 2013 mencakup beberapa dokumen, yaitu terdiri atas: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Kerangka Dasar Kurikulum, 3) Struktur Kurikulum, 4) Silabus, 5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 6) Buku Pedoman, dan 7) Buku Teks Pelajaran.

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Artinya, pembelajaran harus mengembangkan beragam kemampuan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengolah informasi atau asosiasi, dan mengomunikasikan. Kelima kemampuan ini dapat dikembangkan sehingga setiap peserta didik harus menguasainya. Oleh karena itu, pembelajaran dengan Kurikulum 2013 harus bisa diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini bertujuan memberikan pengalaman bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang lebih berkualitas.

Selain Kurikulum 2013, sekolah berasrama juga mengembangkan kurikulum dari lembaga pendidikan yang bersangkutan secara mandiri. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh tim yang terdiri dari guru mata pelajaran dan konsultan. Capaian hasil belajar terdiri atas komponen ujian hasil belajar dan perilaku di asrama (kedisiplinan, sikap, kemandirian, dan

sebagainya). Selain pembelajaran akademik, sekolah juga memberikan pembelajaran non akademik atau ekstrakurikuler yang meliputi kerohanian, kewirausahaan, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Model pengasuhan di asrama dilakukan oleh Pembina asrama dengan cara mengawasi kegiatan peserta didik di luar jam pembelajaran, pemberian konseling dan penegakan peraturan asrama. Selain itu ada pertemuan rutin setiap minggunya yang dilakukan oleh Pembina asrama kepada peserta didik dalam upaya pembinaan peserta didik.

Peraturan kehidupan di asrama yang disusun oleh kepala sekolah bersama tim manajemen disosialisasikan melalui pembagian buku pribadi peserta didik, papan pengumuman dan saat pertemuan rutin. Sanksi ringan atas terjadinya pelanggaran berupa teguran lisan dan hukuman fisik (misalnya lari keliling lapangan, berdiri di lapangan, *push up*, dan sebagainya yang bertujuan untuk melatih fisik peserta didik dan bukan mengandung unsur kekerasan) dan sanksi terberat adalah dikeluarkan dari sekolah.

c. Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Berasrama

Aspek pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien memiliki pengaruh besar bagi keberhasilan pembangunan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap

komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama sebagai berikut:

- 1) Peningkatan potensi SDM yang berkualitas
- 2) Penyediaan komponen-komponen sumber pembiayaan pendidikan
- 3) Penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana
- 4) Pengefektifan dan mengefisienkan penggunaan dana
- 5) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan
- 6) Meminimalisasi terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.

Untuk itu penerimaan dana sekolah, baik sekolah regular maupun sekolah berasrama diperoleh dari BOS Pusat dan BOSDA (Negeri), dan orangtua peserta didik, yayasan, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun komponen-komponen pengeluaran dana untuk sekolah berasrama meliputi kegiatan belajar mengajar ($\pm 6\%$), konsumsi ($\pm 44\%$), gaji dan tunjangan non PNS ($\pm 26\%$), pengadaan sarana dan prasarana ($\pm 12\%$), dan perawatan sarana dan prasarana ($\pm 12\%$).

d. Keunggulan Sekolah Berasrama

Dengan sistem pendidikan yang ketat dan terarah, sekolah berasrama bisa berkembang lebih baik dibandingkan dengan sekolah regular. Beberapa kelebihan dari sekolah berasrama bisa dilihat dari aspek-aspek berikut:

1) *Program pendidikan paripurna*

Umumnya, sekolah-sekolah reguler terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan akademis, sehingga banyak aspek hidup anak yang tidak tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada dalam pengelolaan program pendidikan pada sekolah reguler. Sebaliknya, sekolah berasrama dapat merancang program pendidikan yang komprehensif-holistik dari program pendidikan keagamaan, *academic development*, *life skill* (*soft skill* dan *hard skill*) sampai dengan membangun wawasan global. Bahkan, pembelajaran tidak hanya sampai pada tataran teoritis, tapi juga implementasi, baik dalam konteks belajar ilmu ataupun belajar hidup.

2) *Fasilitas lengkap*

Sekolah berasrama mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari fasilitas sekolah, yaitu kelas belajar yang baik, laboratorium, klinik, sarana olahraga semua cabang olahraga, perpustakaan, kebun dan taman hijau. Sementara di asrama fasilitasnya adalah kamar dengan segala isi sesuai kebutuhan peserta didik. Dan juga tersedia fasilitas dapur beserta perlengkapannya.

3) *SDM yang berkualitas*

Sekolah-sekolah berasrama umumnya menentukan persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas kepada para pengelolanya yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pembina asrama. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah di sekolah berasrama biasanya memiliki kualifikasi akademik setingkat S2 atau Magister. Selain itu, ia juga harus memiliki pengalaman memimpin sekolah-sekolah lain sebelumnya. Sedangkan untuk guru di sekolah berasrama harus memiliki kecerdasan intelektual,

sosial, spiritual, dan kemampuan pedagogis-metodologis. Ditambah lagi kemampuan berbahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan lainnya.

Oleh karena itu, kualifikasi akademik guru S1 dengan jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Rekrutmen guru untuk sekolah negeri dilakukan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau melalui mekanisme penempatan guru yang merupakan wewenang pemerintah daerah setempat. Sementara untuk sekolah swasta, mekanisme pengangkatan dapat melalui seleksi terbuka dan atau penunjukan langsung yayasan/pengelola sekolah.

Selain kepala sekolah dan guru, juga terdapat pembina asrama yang bertugas mengawasi dan membina peserta didik selama berada di asrama. Istilah-istilah yang sering digunakan untuk menyebut para personel ini adalah pembina asrama dan wali asrama. Biasanya, di antara para pembina asrama ada kepala asrama. Dalam hal kualifikasi akademik, kepala asrama disyaratkan untuk memiliki pendidikan minimal S1, sementara pembina asrama boleh berpendidikan lebih rendah dari S1.

Mekanisme pengangkatan pembina asrama adalah melalui seleksi terbuka atau diangkat langsung oleh kepala sekolah dan manajemen sekolah. Pertimbangan yang diambil dalam pengangkatan pembina asrama yaitu pengalaman dan kepribadian. Kinerja pembina asrama dievaluasi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang asrama/kepala asrama dengan mempertimbangkan aspek kedisiplinan, ketaatan, kemampuan manajerial/mengatasi masalah, dan sebagainya.

4) *Kerja sama*

Berbeda dengan sekolah reguler, sekolah berasrama banyak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Kerja sama tersebut meliputi penerapan kurikulum pembelajaran, pengembangan kegiatan non-akademik atau ekstrakurikuler, pengembangan SDM, dan pengembangan fasilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, sekolah berasrama bisa diterapkan di wilayah Papua sebagai solusi untuk menjawab persoalan akses dan mutu dari pelayanan pendidikan yang rendah, demi tercapainya pembangunan pendidikan. Kondisi wilayah yang terisolasi berdampak pada tidak optimalnya distribusi sekolah serta guru di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendidikan berasrama merupakan solusi yang tepat guna mengatasi persoalan ini. Sekolah berasrama dapat menampung siswa dari kampung-kampung yang jauh.

Menurut Harry Nenobais (2012), pendidikan berasrama yang dikembangkan dari TK sampai SMA di Papua ini terbukti secara efektif mampu menjawab persoalan akses. Pada tahapan lebih lanjut, pengembangan pendidikan berpola asrama yang sudah dilakukan di Papua dapat secara efektif meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pendidikan berpola asrama tersebut siswa dididik, diajar, dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung, berkelanjutan dan mendalam.



Kegiatan memasak yang dilakukan secara bergiliran oleh peserta didik di asrama

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terpumpun. Analisis aktor serta kebijakan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peran dan tanggung jawab masing-masing aktor.

Kajian ini merupakan analisis untuk kebijakan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengupayakan layanan pendidikan berasrama di Papua guna meningkatkan kualitas akses dan mutu pendidikan di Papua dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendirian sekolah berasrama selain bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mereduksi keterbatasan akses, juga dapat menjadi wahana penguat integrasi sosial dan kebangsaan. Tahapan analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Penyusunan data berarti penggolongan data dalam pola, tema atau kategori. Sedangkan interpretasi data maksudnya adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Nasution, 1996).

Selanjutnya, analisis data kualitatif dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul. Analisis berikutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus permasalahan penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk melihat pengelolaan sekolah berasrama bagi peningkatan mutu dan akses pendidikan serta penguat integrasi sosial kebangsaan di Provinsi Papua. Sementara itu, lokasi penelitian ini akan mengambil observasi mendalam di sekolah yang sudah menerapkan sekolah berasrama di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua. Sekolah yang menjadi observasi langsung adalah sebagai berikut; SMAN 3 Kota Jayapura, SMAN Olahraga Kota Jayapura, SMP Darul Ma'arif Numbay Kota Jayapura, SMP dan SMA, Advent Kabupaten Jayapura, SD dan SMP Islam Terpadu Insan Cendekia Kabupaten Jayapura, SMKN Pembangunan Pertanian Kabupaten Jayapura, SD dan SMP Satu Atap Bompay Kabupaten Keerom, SMAN 3 Waris Kabupaten Keerom, dan SMPN 9 Waris Kabupaten Keerom.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui: kajian kepustakaan dan dokumen terkait (*desk research*), wawancara mendalam (*depth interview*); observasi (*observation*); diskusi kelompok terpumpun (DKT), dan dokumentasi. Kajian kepustakaan dan dokumen terkait adalah dengan mempelajari berbagai hasil kajian sebelumnya yang terkait dengan upaya untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Papua. Telaah dokumen yang terkait tidak hanya berpijak dari dokumen yang resmi diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun juga menjangkau sumber data sekunder yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, media online serta hasil kajian lain yang tidak terpublikasi. Tentu saja dalam telaah dokumen ini juga untuk mengidentifikasi kondisi dan persoalan penyelenggaraan layanan pendidikan di Papua yang sudah menggunakan konsep sekolah berasrama, sehingga dari pijakan ini akan dapat merumuskan hasil penelitian yang komprehensif.

Sebelum wawancara mendalam dilakukan, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradley pahami sebagai penciptaan *rapport* untuk meminimalisasi keterasingan peneliti dengan para informan dan atau responden peneliti dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerja sama (Faisal, 1990: 54-55). Hal ini dianggap penting karena informan pada setiap strata dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya, karena diduga akan membedah hal-hal yang sifatnya sensitif untuk diinformasikan.

Lewat teknik wawancara, akan digali data selengkap-lengkapnyanya tidak hanya tentang *apa* yang diketahui, *apa* yang

dialami informan, tetapi juga *apa* yang ada dibalik pandangan dan pendapatnya. Untuk itu, pedoman wawancara dan alat bantu berupa kertas dan alat tulis dipersiapkan secara matang sebelum wawancara dilakukan.

Data yang berhasil dijaring, khususnya yang melalui wawancara mendalam bisa dijamin objektivitasnya. Artinya, bias subjektivitas peneliti bisa ditekan serendah mungkin, dikendalikan dengan diskusi dengan informan maupun menelaah hasil-hasil penelitian serupa yang pernah ada sebelumnya. Peneliti juga melakukan diskusi-diskusi dengan sejumlah sejawat yang dianggap sedikit banyak memahami permasalahan yang sedang diteliti.

DKT dilakukan dengan pengelola asrama, dinas pendidikan setempat, siswa sekolah berasrama, perwakilan guru dan kepala sekolah berasrama, dan perwakilan komite sekolah. Dalam DKT, peserta diberi pemaparan mengenai tujuan kajian dan topik yang hendak didiskusikan. Dari DKT dihasilkan data mengenai pengalaman para peserta terkait penyelenggaraan sekolah berasrama.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi, keadaan lingkungan kawasan, dan berbagai kegiatan pendidikan sekolah berasrama di Provinsi Papua. Untuk membantu dan memudahkan dalam proses pengumpulan data primer, peneliti menggunakan pengumpulan data penelitian berupa buku catatan lapangan, panduan wawancara, *voice recorder*, dan kamera. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, penelusuran internet, penelusuran dokumen, kajian terhadap

literatur, peraturan perundang-undangan, dan data pendukung lainnya.

C. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Tahap analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Penyusunan data berarti penggolongan data dalam pola, tema atau kategori. Sedangkan interpretasi data maksudnya adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Nasution, 1996). Selanjutnya analisis data kualitatif dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data.

Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan cepat tanpa harus menunggu banyaknya data yang terkumpul. Analisis berikutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus permasalahan penelitian.

Makan bersama di meja panjang membangun keakraban antar peserta didik



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Provinsi Papua

1. Kondisi Geografis Papua

Provinsi Papua mempunyai luas wilayah 316.553,07 km² dan merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan menempati 16,70 persen dari seluruh luas daratan Indonesia. Wilayah Provinsi Papua terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kotamadya. Kabupaten terluas adalah Kabupaten Merauke dengan luas mencapai 47.406,90 km² dan menempati 14,98 persen wilayah Provinsi Papua. Sementara itu, kabupaten terkecil adalah Kabupaten Supiori dengan luas 634,24 km² atau menempati 0,20 persen dari wilayah Provinsi Papua. Jumlah distrik di Provinsi Papua ada sebanyak 499, sedangkan untuk jumlah kampung/kelurahan mencapai hingga 4.445. Dimana jumlah distrik terbanyak ada di Kabupaten Yahukimo dengan jumlah 51 distrik.

Sementara itu jumlah distrik terkecil dimiliki oleh Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Deiyai dan Kota Jayapura yang hanya memiliki 5 (lima) distrik. Untuk wilayah administratif kampung/kelurahan yang terbanyak ada di Kabupaten Tolikara dengan jumlah mencapai 535 kampung. Sebaliknya jumlah kampung/kelurahan paling sedikit

ditemukan di Kabupaten Yalimo yang hanya memiliki 27 kampung.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 2.833.831 jiwa. Penduduk Papua adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Papua selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk Provinsi Papua sebesar 10,13 orang/km² yang artinya untuk setiap km persegi wilayah Papua ditempati oleh 10 hingga 11 orang penduduk. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Papua masih sangat rendah. Sekitar 1.983.682 jiwa atau 70 persen penduduk Papua tinggal di pedesaan dengan topografi beragam. Dari jumlah tersebut sebanyak 37 persen penduduk Papua tinggal di kabupaten pegunungan, 41 persen di kabupaten dataran rendah yang mudah diakses, dan sisanya sekitar 22 persen tinggal di kabupaten dataran rendah yang sulit diakses.

Kampung-kampung di Papua banyak yang terletak di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Untuk menuju ke daerah pedalaman satu-satunya alat transportasi yang dapat digunakan adalah pesawat terbang atau bisa juga dengan berjalan kaki dengan menempuh jarak yang bermil-mil jauhnya. Hal ini disebabkan belum adanya jalan tembus darat yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Kondisi ini menjadi salah satu kendala penduduk dalam mengakses pendidikan. Penduduk kesulitan dalam berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain karena akses jalan dan transportasi yang masih sangat terbatas, khususnya di daerah pedalaman Papua. Jarak antara rumah dan sekolah yang jauh mengakibatkan siswa

mebutuhkan waktu yang panjang untuk menuju sekolah. Siswa harus lebih lama terpisah dari keluarganya dan berisiko menghadapi bahaya dan kelaparan di jalan. Bahkan, beberapa siswa membawa perbekalan seadanya seperti mie instan mentah ketika menuju sekolah.

2. Kondisi Sosial Politik Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan status sebagai daerah otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan ini meliputi kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Oleh karena itu, otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dengan langkah ini diharapkan perkembangan pembangunan di Papua bisa segera sejajar dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk mendukung langkah tersebut, Provinsi Papua mendapatkan kucuran dana otonomi khusus (Otsus) yang besar dari pemerintah yang ditetapkan dalam APBN pada setiap tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, besarnya dana Otsus yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di Papua cukup tinggi, yakni sebesar 30% dari total anggaran yang diterima daerah dari APBN. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), yang dilengkapi dengan tenaga pengajar dan fasilitas penunjang lain. Selain itu, dana Otsus juga bisa dijadikan sebagai bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa, terutama bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik di wilayah Papua maupun di luar wilayah Papua.

Dengan melihat besarnya dana Otsus tersebut, seharusnya biaya pendidikan di Papua bisa digratiskan. Namun demikian, dalam realitanya penggunaan dana Otsus tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih banyak anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi di Papua maupun di luar Papua yang ditanggung oleh orang tuanya masing-masing. Kondisi ini menjelaskan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih menyisakan sebagian permasalahan yang belum tertangani dengan baik.

Dengan wilayah yang cukup sulit untuk diakses, maka masyarakat Papua yang tinggal di pedalaman masih memiliki budaya tradisional. Di mana adat istiadat sangat kuat mempengaruhi dan mengatur pola hidup mereka sehari-hari. Kurang lebih dari tiga jutaan penduduk pribumi Papua menggunakan 250 bahasa yang berbeda dan mempunyai kebudayaan yang unik. Tingkat kepadatan penduduk yang rendah

dan fragmentasi kebudayaan yang ekstrim, terkadang menimbulkan saling bentrok satu sama lain.

Perang antarsuku yang terus-menerus terjadi di beberapa daerah dan konflik-konflik yang muncul karena sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) telah membuat suasana sosial di masyarakat Papua bertambah panas. Selain itu, masih banyak dari masyarakat Papua yang belum memahami secara baik betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak dan kemajuan daerahnya, sehingga partisipasi aktif mereka dalam dunia pendidikan masih sangat rendah. Kondisi ini juga menjadi faktor penghambat tercapainya pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.

Dalam kehidupan masyarakat Papua, banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Tradisi ini membuat anak perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal yang layak. Tradisi ini selain bertujuan untuk mempererat ikatan kekerabatan antar keluarga, juga bermotif ekonomi untuk mengurangi beban keluarga. Dalam masyarakat yang menerapkan budaya patriarki seperti di Papua, maka setelah anak perempuan menikah beban untuk merawat dan menafkahi secara otomatis berpindah dari pihak keluarga ke pihak suami. Dengan demikian beban ekonomi keluarga perempuan menjadi berkurang.

Terkadang demi mengurangi beban ekonomi keluarga, pihak orang tua di Papua menilai anak sebagai faktor produksi. Artinya anak-anak dianggap masih memiliki kewajiban ikut menyokong penghidupan keluarga. Oleh karena itu, mereka harus membantu

orang tuanya masuk hutan untuk berburu, meramu, ataupun bekerja di ladang. Persepsi para orangtua tersebut sampai saat ini belum benar-benar mampu digeser, sehingga secara umum orang tua belum menyadari bahwa anak-anak memiliki hak penuh untuk mengenyam pendidikan.

Kondisi ini masih ditambahi dengan adanya tradisi palang memalang yang sering terjadi di dalam masyarakat Papua sebagai bentuk protes. Secarah harfiah palang berarti penghalang supaya orang lain atau sesuatu tidak bisa masuk atau lewat. Tradisi palang memalang yang terjadi di Papua merupakan sebuah kebiasaan negatif yang dilakukan masyarakat dengan menghadang/memalang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Budaya palang memalang ini biasa dilakukan masyarakat untuk melakukan tuntutan terhadap pemerintah atau pihak sekolah. Kepada pihak pemerintah, pemalangan biasa dilakukan untuk menuntut kenaikan jabatan atau uang tunjangan.

Sementara pemalangan yang dilakukan terhadap pihak sekolah, biasanya berkaitan dengan uang ganti tanah untuk pembangunan sekolah. Dalam beberapa kasus, pemalangan di sekolah juga berkaitan dengan tuntutan orang tua agar anaknya bisa diterima masuk di sekolah yang bersangkutan. Bahkan, tradisi palang-memalang ini juga biasa dilakukan oleh orang tua yang mengasramakan anaknya untuk menuntut pihak pengelola apabila terjadi suatu hal dengan anak tersebut. Hal ini tentu membebani pengelola asrama karena orang tua menuntut pengelola dengan sejumlah uang tebusan atas suatu insiden yang terjadi pada anaknya selama di asrama, padahal jika ditelaah lebih lanjut seringkali insiden yang terjadi di asrama bukan disebabkan pihak

pengelola, melainkan kesalahan dari anak itu sendiri. Namun demikian, kebanyakan orang tua siswa tidak ingin mengetahui fakta yang terjadi terhadap anaknya dan tetap meminta pihak pengelola untuk bertanggung jawab.

3. Pembangunan Manusia di Papua

Pembangunan manusia adalah upaya memperluas pilihan hidup penduduk dengan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, inti dari pembangunan manusia adalah manusia itu sendiri dan kesejahteraannya. Pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui tiga komponen dasar yaitu; berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan, serta memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga komponen dasar ini tidak terpenuhi, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Dengan demikian, pemenuhan ketiga komponen tersebut sudah dapat merefleksikan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

a. Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya

Saat ini keberadaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi indikator penting untuk melihat sisi lain dari keberhasilan pembangunan di dunia, termasuk di Indonesia dan Provinsi Papua. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu indikator strategis dalam perencanaan pembangunan Nasional. Indonesia menjadikan IPM sebagai salah satu ukuran kinerja

pemerintah. Selain itu, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM pertama kali diperkenalkan oleh Badan PBB yang bernama United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan IPM sebagai indeks komposit yang mampu untuk mengukur pembangunan manusia melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui variabel angka harapan hidup saat lahir, sedangkan dimensi pengetahuan diukur melalui variabel angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, untuk mengukur dimensi standar hidup layak dapat digunakan variabel PDB per kapita.

Di Indonesia, penghitungan IPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan dasar-dasar penghitungan yang dilakukan oleh UNDP. Hal ini dilakukan agar nilai IPM yang dikeluarkan baik oleh BPS maupun UNDP bisa dibandingkan secara internasional. Oleh karena itu, dalam penghitungan IPM, BPS menggunakan sumber data sebagai berikut:

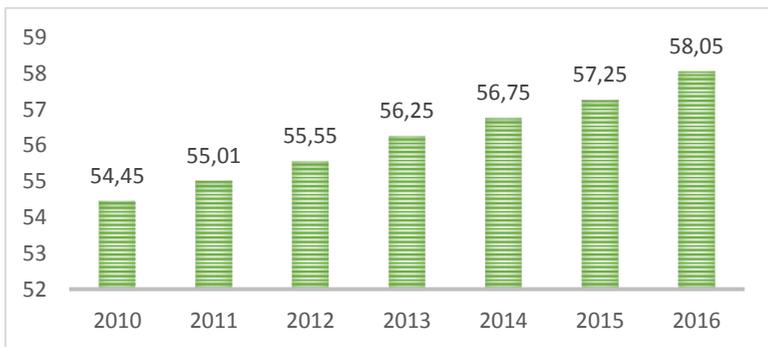
- 1) Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- 2) Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- 3) PNB per kapita yang didekatkan dengan pengeluaran per kapita (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS).

Penghitungan terhadap ketiga dimensi pengukuran pembangunan manusia, akan menghasilkan nilai IPM. Lambatnya

peningkatan dimensi IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal (100). Kecepatan suatu daerah dalam mencapai IPM ideal ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan IPM. Konsep pertumbuhan IPM berpegang pada semakin besar nilai IPM dengan besar perubahan yang sama, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang semakin kecil.

b. Capaian Pembangunan Manusia di Papua

Secara umum, capaian pembangunan manusia di Papua menunjukkan peningkatan, meskipun belum mampu mengangkat Papua keluar dari kategori “rendah” dalam status pembangunan manusianya. Belum mampunya IPM Papua menembus kategori “sedang” disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan dimensi-dimensi IPM.



Grafik 4.1. Indeks Pembangunan Manusia di Papua Tahun 2010-2016

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Papua.

Berdasarkan Grafik 4.1. dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2010-2016, Papua berhasil meningkatkan capaian IPM yang semula bernilai 54,45 pada tahun 2010 menjadi 58,05 di tahun 2016. Kenaikan sebesar 3,60 poin selama kurun waktu enam tahun menunjukkan prestasi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Selama enam tahun ke belakang, rata-rata pertumbuhan IPM di Provinsi Papua mencapai 1,01 persen per tahun. Pertumbuhan IPM tertinggi dalam kurun waktu 2010-2016 terjadi di tahun 2013 sebesar 1,26 persen. Namun, kenaikan capaian IPM tersebut masih belum mampu mengangkat IPM Papua yang hingga tahun 2016 masih berada dalam kategori rendah.

Capaian IPM di Papua tersebut merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pengukuran terhadap dimensi IPM penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Hal ini disebabkan hasil nilai akhir IPM merupakan kombinasi dari nilai dimensi-dimensinya. Berdasarkan perhitungan dimensi IPM, secara umum Provinsi Papua mengalami peningkatan di seluruh dimensi.

Tabel 4.1. Dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tahun 2012-2016

Dimensi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun)	64,31	64,46	64,60	64,75	64,84	65,09	65,12
Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,57	8,92	9,11	9,58	9,94	9,95	10,23
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,59	5,60	5,73	5,74	5,76	5,99	6,15

Dimensi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)	6 251	6 303	6 349	6 394	6 416	6 469	6 637
IPM	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Papua.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diimplementasikan melalui variabel Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, capaian AHH saat lahir di Provinsi Papua mencapai 65,12 tahun. Hal ini berarti harapan hidup bayi yang baru lahir di Papua dapat bertahan hidup hingga usia 65,12 tahun. Dalam kurun waktu 2010-2016, AHH saat lahir di Papua telah meningkat sebesar 0,81 poin yaitu sebesar 64,31 tahun pada tahun 2010 menjadi 65,12 tahun di 2016. Secara rata-rata pertumbuhan AHH saat lahir adalah sebesar 0,20 persen per tahun. Selama periode 2010-2016 pertumbuhan AHH saat lahir tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,39 persen.

Angka harapan hidup saat lahir merupakan variabel yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2010-2016 menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Dimensi IPM yang kedua, yaitu dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah

(HLS). Variabel RLS merupakan gambaran dari output pembangunan jangka panjang, sehingga perkembangan variabel RLS ini relatif lebih lambat, jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Sebaliknya, HLS merupakan variabel proses pembangunan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Kedua variabel ini menjadi gambaran capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa RLS di Papua pada tahun 2016 sebesar 6,15 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 6,15 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun. Dalam kurun waktu 2010-2016 variabel RLS di Provinsi Papua meningkat sebesar 0,56 poin sedangkan secara rata-rata pertumbuhan indikator RLS di Provinsi Papua selama tahun 2010-2016 sebesar 1,61 persen. Pertumbuhan RLS tertinggi selama tahun 2010-2016 terjadi di tahun 2015, dimana pertumbuhan RLS mencapai hingga 3,99 persen.

Variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS di Papua pada tahun 2016 adalah sebesar 10,23 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 10,23 tahun, setara dengan kelas X atau Kelas 1 SMA. Selama periode tahun 2010 hingga 2016, Pemerintah Papua mampu meningkatkan HLS Papua hingga 1,66 poin yang semula di tahun 2010 sebesar 8,57 tahun menjadi 10,23

tahun di tahun 2016. Secara rata-rata HLS di Papua meningkat sebesar 3,01 persen per tahun, namun pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 sebesar 5,16 persen.

Peningkatan HLS yang cukup signifikan merupakan *booster* atau penyemangat bagi Pemerintah Papua untuk terus meningkatkan capaian IPM. Untuk menjaga konsistensi peningkatan nilai HLS secara langsung dapat dilakukan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan. Kondisi RLS juga tidak jauh berbeda, meskipun tumbuh dengan cukup tinggi, namun variabel RLS di Papua masih sangat rendah. Menjaga konsistensi peningkatan indikator RLS dapat dilakukan dengan menurunkan angka putus sekolah. Rendahnya RLS di Papua berkaitan secara langsung dengan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, di mana sebagian besar fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di Papua masih terpusat di wilayah perkotaan.

Dimensi terakhir dalam penghitungan IPM, yaitu dimensi hidup layak yang diukur melalui variabel pengeluaran per kapita. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita penduduk Papua mencapai 6.637.000. Seperti halnya variabel lainnya, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana selama periode 2010-2016 meningkat hingga 386.000. Secara rata-rata, pertumbuhan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 1,01 persen per tahun serta tahun 2016 menjadi tahun dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 2,60 persen. Besaran nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan merefleksikan tingkat daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Berbagai capaian dari dimensi IPM tersebut telah dapat menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Papua masih termasuk dalam kategori rendah. Dengan membandingkan IPM Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia akan diketahui sudah sampai mana pembangunan di Provinsi Papua. Capaian IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 70,78. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat 8 provinsi yang memiliki capaian IPM kategori “tinggi”, 25 provinsi berada pada kategori “sedang”, dan satu provinsi yang berada pada kategori “rendah”. IPM tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian IPM sebesar 78,99. Sebagai pusat dari pemerintahan dan ekonomi Indonesia, DKI Jakarta memiliki kelengkapan sarana prasarana yang lengkap. Oleh karena itu, DKI Jakarta merupakan daerah yang menjadi kantung sumber daya manusia berkualitas.

Sementara itu, Papua menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori capaian IPM “rendah”, yaitu sebesar 57,25. Tidak dapat dipungkiri jika garis *start* pembangunan di Provinsi Papua memang tidak sama jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, sehingga pembangunan di Provinsi Papua cenderung terkesan tertinggal. Hingga saat ini, Papua masih terjebak dalam kesulitan mengakses sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

4. Kondisi Pendidikan di Papua

Kondisi pendidikan di kabupaten/kota Papua cukup memprihatinkan. Sebagian besar penduduk di kabupaten-kabupaten wilayah pegunungan tidak atau belum pernah sekolah. Hanya di beberapa kabupaten/kota saja yang penduduknya hampir sebagian besar berpendidikan tinggi (SMA ke atas) seperti Kota Jayapura (57,14 persen), Mimika (51,63 persen), dan Biak Numfor

(42,25 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Papua belum dapat dinikmati secara merata oleh semua penduduk di wilayah Papua.

Penduduk di daerah perkotaan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan dibandingkan penduduk di daerah perdesaan, penduduk laki-laki mendapatkan kesempatan yang lebih luas daripada perempuan, penduduk di wilayah pesisir cenderung mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan daripada di wilayah pegunungan. Lebih lanjut, mengenai gambaran pembangunan pendidikan di Papua dapat dilihat lewat capaian Angka Partisipasi Murni dan Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Kelulusan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Ketersediaan Guru dan Tenaga Pengajar.

a. Angka Partisipasi Murni dan Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah. APM dapat digunakan untuk mengetahui partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Nilai APM yang terbaik adalah apabila mencapai 100 persen, yang artinya seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu. Nilai APM akan selalu lebih kecil dari nilai APK, karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Kedua indikator ini sering digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian pembangunan pendidikan. Dengan menggunakan kedua indikator tersebut, maka kondisi pencapaian pembangunan pendidikan di Papua dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA di Provinsi Papua Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	APM		APK	
	Prov. Papua	Nasional	Prov. Papua	Nasional
SD	78.66	93.86	94.74	106.44
SMP	54.26	76.29	72.07	101.05
SMA	43.27	61.20	66.85	81.95

Sumber : *Badan Pusat Statistik Papua Tahun 2016.*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 94.74%, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencapai 72.07 %, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 66.85%. Pencapaian tersebut masih dianggap rendah dan tertinggal dengan hasil pencapaian APK secara nasional.

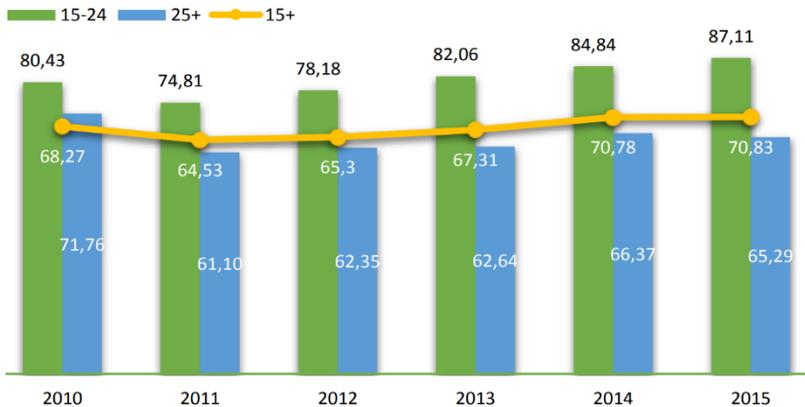
Hal ini disebabkan secara nasional APK Indonesia pada tahun 2016 mencapai 106.44% untuk jenjang SD, SMP 101.05% dan SMA 81.95%. Kondisi ini juga berlaku untuk pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua masih tertinggal secara nasional.

APM menunjukkan gambaran yang lebih tepat tentang partisipasi siswa yang bersekolah sesuai dengan usia dan jenjang sekolahnya. APM untuk jenjang SD di Papua pada tahun 2016 hanya mencapai 78.66 %, SMP 54.26%, dan SMA 43.27%, sedangkan APM Indonesia secara nasional sudah mencapai 93.86% untuk jenjang SD, SMP 76.29%, dan SMA 61.20%. Dengan jumlah tersebut, artinya bahwa penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang belum bersekolah jumlahnya masih sangat banyak, yaitu mencapai 21.34% untuk jenjang SD, SMP 45.74%, dan SMA 56.73%.

b. Angka Melek Huruf

Menurut Unesco, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan ini merupakan modal dasar seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, sehingga dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi dan pengetahuan, sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini capaian AMH di banyak negara di dunia sudah hampir mencapai 100 persen. Akan tetapi, di beberapa wilayah khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, capaian indikator tersebut masih rendah, termasuk di Papua.



Grafik 4.2. Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk di Provinsi Papua

Sumber: Pusdalisbang Provisi Papua 2015.

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 penduduk Papua usia 15 tahun ke atas yang melek huruf hanya 70,83 persen. Hal ini berarti masih ada sekitar 29 persen penduduk yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Kondisi ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.

Secara nasional, pemerintah menargetkan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya 96,10 persen, sehingga hanya sekitar 4,78 persen saja yang tidak dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan kondisi Papua tersebut, angka 29 persen masih sangat tinggi, bahkan merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Tabel 4.3. Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2016.

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Perkotaan	98.56	96.24	97.51
Perdesaan	67.98	53.07	60.87
Perkotaan + Perdesaan	76.72	64.60	71.02

Sumber: Susenas, 2016.

Pada tahun 2016, AMH penduduk 15 tahun ke atas di Papua meningkat menjadi 71,02 persen, yang berarti dari setiap 100 penduduk 15 tahun ke atas terdapat 71-72 orang yang mampu membaca dan menulis. Namun, kondisi ini masih dianggap jauh dari target nasional. Data Susenas pada Tabel 4.3. menunjukkan bahwa AMH daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada AMH perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 97,51 persen dan 60,87 persen.

Penduduk yang tinggal di wilayah pesisir seperti Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, dan beberapa kabupaten di wilayah pesisir lainnya relatif memiliki kemampuan baca dan tulis yang lebih baik dari penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan seperti Mamberamo Tengah, Puncak, Intan Jaya, dan kabupaten di wilayah pegunungan lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya persentase penduduk di wilayah pesisir yang dapat membaca dan menulis sebesar 97,51 persen, sementara penduduk di wilayah pegunungan, capaian angka melek huruf berada di bawah angka provinsi yaitu sebesar 60,87 persen.

Demikian halnya menurut jenis kelamin, di mana AMH laki-laki lebih tinggi (76,72 persen) dibandingkan perempuan (64,60 persen). Ketimpangan antar daerah tempat tinggal serta antar jenis kelamin perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Papua. Target utama untuk pemberantasan buta aksara adalah pada mereka yang tinggal di daerah perdesaan, di mana pada umumnya yaitu mereka yang tinggal di wilayah pegunungan, dan mereka yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini penting untuk dilakukan karena kemampuan membaca dan menulis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang jika ingin berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi pembangunan.

c. Angka Kelulusan

Rendahnya Angka Melek Huruf (AMH) berimplikasi terhadap angka kelulusan dan daya saing masyarakat, baik dalam menangkap peluang kerja maupun mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui angka kelulusan atau pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan analisis pasar tenaga kerja. Dalam dunia ketenagakerjaan, perusahaan cenderung menerima pekerja dengan melihat pendidikan yang ditamatkan. Bagi perusahaan, menerima pekerja dengan pendidikan tinggi lebih menguntungkan dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi produktivitasnya. Oleh karena itu, secara umum pendidikan yang tinggi masih sangat relevan dan penting untuk kesejahteraan penduduk.

Namun demikian, hingga tahun 2016 kondisi pendidikan di Papua masih memprihatinkan. Dari Tabel 4.4 di atas diketahui

bahwa hampir 40 persen penduduk Papua usia 15 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah. Hanya 20,94 persen saja yang memiliki ijazah SMA/ sederajat dan tidak sampai tujuh persen yang memiliki ijazah perguruan tinggi (diploma dan sarjana). Sementara sebesar 26,40 persen penduduk hanya memiliki ijazah SD/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Papua berpendidikan rendah (SD/ sederajat).

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan & Perdesaan
Tidak punya ijazah	6.87	49.70	37.84
SD/ sederajat	26.44	26.39	26.40
SMP/ sederajat	11.74	6.95	8.28
SMA/ sederajat	38.72	14.13	20.94
D1/ D2	0.69	0.12	0.28
D3	2.78	0.50	1.13
D4/ S1/ S2/ S3	12.76	2.22	5.14
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas, 2016.

Selain itu, angka kelulusan di Papua menunjukkan adanya ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Secara umum, angka kelulusan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah perdesaan. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah di daerah perkotaan hanya sebesar 6,87 persen, dan hampir 40 persen penduduk Papua usia 15 tahun ke atas di perkotaan memiliki ijazah SMA dan sebesar 16,23 persen memiliki

ijazah perguruan tinggi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan masyarakat di daerah perdesaan, di mana hampir 50 persen penduduknya tidak memiliki ijazah, sebesar 26,39 persen memiliki ijazah SD/ sederajat, dan hanya sekitar 17 persen yang memiliki ijazah SMA ke atas.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Tidak punya ijazah	32.28	44.09	37.84
SD/ sederajat	27.19	25.52	26.40
SMP/ sederajat	9.01	7.45	8.28
SMA/ sederajat	24.34	17.12	20.94
D1/D2	0.26	0.30	0.28
D3	0.92	1.37	1.13
D4/S1/S2/S3	6.01	4.15	5.14
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas, 2016.

Menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki pendidikan yang lebih baik daripada penduduk perempuan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4.5 di atas, sebesar 31,53 persen penduduk laki-laki 15 tahun ke atas memiliki ijazah SMA ke atas, sementara penduduk perempuan hanya sebesar 22,94 persen saja yang memiliki ijazah tersebut. Bahkan data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sebesar 44,09 persen perempuan di Papua tidak memiliki ijazah. Hal ini menjadi indikasi

adanya perbedaan akses terhadap pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Papua.

Kondisi tersebut juga masih diperparah dengan permasalahan kualitas siswa lulusan sekolah. Di beberapa wilayah, terutama yang berada di pegunungan memiliki kualitas siswa lulusan sekolah yang rendah, karena masih adanya siswa sekolah yang tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kepedulian orang tua pada pendidikan. Meskipun angka kelulusan mampu mencapai seratus persen, tetapi angka tersebut tidak benar-benar merepresentasikan kualitas pendidikan. Fakta empirik menunjukkan bahwa banyak anak sekolah tingkat SMP yang bahkan belum lancar membaca dan berhitung.

Kondisi ini disebabkan oleh kebiasaan sekolah-sekolah setempat yang selalu memberi kelonggaran nilai pada murid-murid sekolah agar para murid dapat lulus semua. Tidak jarang orang tua murid yang memaksa pihak sekolah agar meluluskan anak mereka, sehingga pihak sekolah tidak punya pilihan kecuali meluluskan semua murid.

Dengan demikian, angka kelulusan di Papua belum sepenuhnya mampu menjadi indikator dalam memetakan kualitas pendidikan. Angka kelulusan tersebut terkesan tidak jujur dengan kondisi riil. Adapun faktor yang melatarbelakangi fenomena ini adalah “paksa lulus”. Berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan dalam hal ini dinas pendidikan, guru, dan orang tua saling berkoordinasi untuk meluluskan siswa dengan beberapa pertimbangan, yakni: pertama, adanya tekanan dari orang tua kepada pihak sekolah untuk meluluskan siswa tersebut. Kedua,

adanya kepentingan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dengan kelulusan 100 persen, agar siswa lulusan di Papua dapat terserap di pasar ketenagakerjaan dan meningkatkan jumlah lulusan agar diterima di jenjang pendidikan lanjutan hingga perguruan tinggi.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rendahnya capaian APM dan APK di Provinsi Papua sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hingga saat ini kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Papua masih sangat terbatas dan belum merata pada tiap distrik. Padahal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan di suatu wilayah. Mengenai jumlah sekolah yang ada di Provinsi Papua bisa dilihat pada Tabel 4.6.

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa saat ini di Provinsi Papua telah terdapat 3.049 sekolah yang terdiri atas 2.236 sekolah jenjang SD, 596 SMP, dan 217 SMA. Jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang apabila dibagi secara merata untuk melayani pendidikan di Provinsi Papua yang terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kotamadya. Dengan jumlah distrik di Provinsi Papua sebanyak 499 dan jumlah kampung/kelurahan mencapai 4.445. Oleh karena itu, rata-rata satu distrik di Papua hanya terdapat 1 sekolah setingkat SMP. Sementara untuk 1 sekolah SMA harus bisa menampung siswa dari 2 distrik, dan setiap 1 sekolah SD harus menampung siswa dari 2 kampung/kelurahan.

Tabel 4.6. Data Pokok Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Provinsi Papua Tahun 2016/2017

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Siswa	KS + Guru	Rasio Guru/Siswa
SD	2.236	408.762	15.108	27.06
SMP	596	120.260	6.764	17.78
SMA	217	58.152	3.674	15.82
Total	3.049	587.174	25.546	22.98

Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017.

Kondisi ini tentu masih jauh dari ideal, karena dalam kenyataannya pembagian sekolah tersebut tidak merata. Artinya, belum tentu dalam satu distrik bisa terdapat sarana dan prasarana yang lengkap dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan tersebut mengumpul di area distrik yang memiliki akses dan infrastruktur bagus, seperti ibukota distrik atau ibukota kabupaten.

e. Ketersediaan Guru dan Tenaga Pengajar

Berdasarkan data dari Tabel 4.6, apabila jumlah ketersediaan kepala sekolah dan guru dibandingkan dengan jumlah siswa, maka dapat diketahui jumlah rasio guru dan siswa. Untuk jenjang pendidikan SD rasio guru dan siswa di Papua sebesar 27.06, yang artinya satu orang guru SD mendidik sekitar 27 siswa. Rasio guru dan siswa untuk jenjang pendidikan SMP adalah 17.78, artinya satu guru SMP mendidik sekitar 17-18 siswa. Sementara untuk rasio guru dan siswa di jenjang SMA adalah 15.82, yang artinya satu guru SMA mendidik sekitar 15-16 siswa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah siswa terhadap guru pada

tingkat SD, SMP, dan SMA adalah 20:1. Dalam konteks Provinsi Papua, rasio guru terhadap siswa untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sudah terpenuhi, karena rasio rata-rata guru dan siswa untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut adalah 22.98, yang artinya satu guru mengajar 22-23 siswa.

Meskipun ketersediaan guru dan tenaga pengajar di Provinsi Papua sudah terpenuhi, tetapi masih terdapat persoalan berupa ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan serta ketidaksiplinan guru. Misalnya, kasus yang terjadi di SMAN 1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Guru Kimia harus merangkap mengajar mata pelajaran Fisika dan Biologi dikarenakan ketiadaan guru mata pelajaran Fisika dan Biologi (Bambang Purwoko, dkk., 2015).

Selain itu, keterisolasian wilayah Papua di bagian pedalaman telah mengakibatkan keterbatasan pelayanan publik dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta umum. Hal ini menyebabkan guru enggan tinggal di tempat tugasnya, sehingga masih banyak dijumpai guru yang mangkir dari tugasnya. Mereka lebih memilih tinggal di daerah dekat kota seperti di Nabire atau Timika dan hanya datang ke tempat tugas untuk mengambil gaji. Mangkirnya guru tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya insentif yang diterima guru honor.

Rata-rata gaji yang diterima oleh guru honor di Papua per bulan adalah Rp. 1.500.000,00. Sementara itu harga-harga kebutuhan sembilan bahan pokok cukup tinggi. Bahkan di wilayah pedalaman Papua seperti di Kabupaten Intan Jaya, harga satu karung beras 15 kilogram adalah Rp. 500.000,00. Hal tersebut

membuat guru-guru kontrak yang direkrut oleh pemerintah merasa tidak betah karena gaji yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Rendahnya komitmen guru tersebut berdampak pada kreativitas dalam melakukan pengajaran. Metode yang dilakukan para guru masih cenderung konvensional dan belum ada terobosan baru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang ada. Hal ini membuat siswa merasa jenuh ketika berada di kelas, sehingga banyak siswa yang lebih memilih untuk bermain bersama temannya dibanding harus belajar di kelas.

B. Kondisi Sekolah Berasrama di Papua

Sekolah berasrama adalah model pendidikan yang dapat mejadi alternatif untuk meningkatkan akses, mutu dan karakter peserta didik di Provinsi Papua. Sekolah berasrama menuntut peserta didik untuk tinggal di asrama dan berinteraksi secara lebih lama dengan para pengajar dan peserta didik lain. Dalam proses pendidikan seperti itu, peserta didik tidak hanya mendapatkan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual. Mereka dididik, diajar, dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung, berkelanjutan dan mendalam. Dengan demikian, pengembangan pendidikan di sekolah berasrama dapat secara efektif meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Kebijakan Pendidikan di Papua

Dengan beragam permasalahan pembangunan pendidikan, tampaknya sekolah berasrama menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat Papua. Hal ini sudah banyak disadari oleh pejabat setempat. Berkaca pada keberhasilan dan pengalaman mereka yang

dulu mendapat pendidikan di sekolah berpola asrama. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Papua bekerja sama dalam mengembangkan sekolah berasrama.

Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat berharap agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui, antara lain:

- a. penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pemberantasan tuna aksara dan penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua;
- c. penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru;
- d. peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital/*e-learning*);
- e. pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri orang asli Papua; dan
- f. pemberian dukungan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan dosen dan tenaga ahli.

Sementara itu, di pemerintah daerah (Provinsi), pengembangan sekolah berasrama ditangani oleh Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan

Khusus (PTLK). Saat ini sekolah berasrama yang langsung di bawah penanganan PTLK adalah SMAN 3 Kota Jayapura dan SMAN Olahraga Kota Jayapura. Setiap tahun pemerintah provinsi menggelontorkan dana 11 Milyar bagi pengelolaan asrama di kedua sekolah tersebut. Hal ini dilakukan karena SMAN 3 Kota Jayapura dan SMAN Olahraga Kota Jayapura menjadi pilot proyek pengembangan sekolah berasrama di Provinsi Papua. Bahkan, SMAN 3 Kota Jayapura dijadikan sebagai model pengembangan sekolah asrama berbasis wilayah adat.

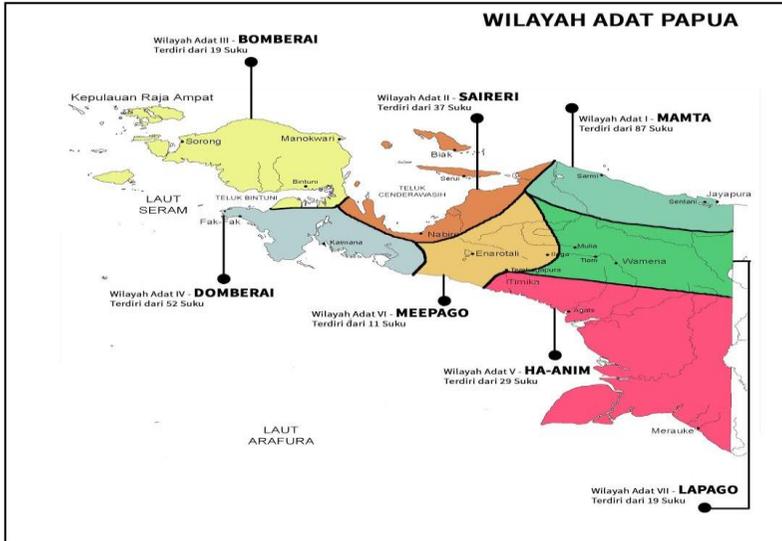
Saat ini pemerintah Provinsi Papua sedang menyiapkan pembangunan sekolah asrama percontohan di lima wilayah adat Papua, yaitu Mamta, Saireri, Animha, La Pago, dan Mee Pago. Di masing-masing wilayah adat tersebut nantinya akan dibangun satu sekolah berasrama sebagai sekolah unggulan dan percontohan yang pengelolaannya langsung ditangani oleh pemerintah Provinsi melalui Bidang PKLK. *Grand desain* dari sekolah tersebut sudah ada dan lokasi tanahnya juga sudah selesai dibebaskan oleh pemerintah. Pembangunan tahap pertama dilakukan di Wamena yang menjadi pusat dari wilayah adat La Pago.

Tabel 4.7. Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua

Mamta (1)	Saireri (2)	Animha (3)	La Pago (4)	Mee Pago (5)
Kota Jayapura	Biak Numfor	Merauke	Jayawijaya	Mimika
Jayapura	Kep. Yapen	Boven Digoel	Yahukimo	Nabire
Keerom	Waropen	Mappi	Tolikara	Paniai
Sarmi	Supiori	Asmat	Puncak Jaya	Dogiyai
Mamberamo Raya			Yalimo	Deiyai
			Lanny Jaya	Intan Jaya
			Mamberamo Tengah	
			Pegunungan Bintang	
			Puncak	
			Nduga	

Sumber: Pusedalisbang Provinsi Papua 2015.

Pembangunan ini sudah hampir selesai dan kemudian dilanjutkan dengan 4 (empat) wilayah adat lainnya. Pengembangan sekolah asrama tersebut disiapkan seperti SMAN 3 Kota Jayapura. Oleh karena itu, segala kelengkapan pendidikan seperti kualitas tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem pembelajarannya dibuat mirip dengan yang dikembangkan di SMAN 3 Kota Jayapura.



Peta 4.1. Wilayah Adat Papua

Sumber: <https://indonesia.go.id>

Langkah ini diambil sebagai terobosan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua. Oleh karena itu BAPPENAS bersama Pemerintah Provinsi Papua merumuskan pendekatan pembangunan kawasan strategis berbasis lima wilayah adat. Pembagian kawasan ini berdasarkan kedekatan kultur, kedekatan teritorial, dan kedekatan dalam indikator pembangunannya. Pembangunan yang berbasis pada lima wilayah adat ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Provinsi Papua dalam percepatan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan, sehingga lebih terarah dan tepat sasaran.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah percontohan tersebut akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu

bertujuan untuk membangun dan menyiapkan orang asli Papua serta penduduk Papua yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri, dan sehat. Sementara itu, prinsip yang digunakan adalah memberikan prioritas kepada orang asli Papua untuk bisa masuk di sekolah tersebut. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Dari segi biaya sebisa mungkin ditekan serendah-rendahnya dengan memperhatikan kemampuan orang tua. Selanjutnya proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kurikulum lokal dengan pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi dan ruang.

Selain sekolah asrama yang dikembangkan di lima wilayah adat tersebut, pengelolaan sekolah asrama yang ada saat ini diserahkan kepada masing-masing yayasan dan pemerintah kabupaten/kota. Biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang jumlahnya sekitar 30 persen dari total Dana Otonomi Khusus yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Dana ini biasanya diserahkan ke sekolah dalam bentuk BOS/BOSDA.

Sementara itu, untuk sekolah asrama yang berada dibawah pengelolaan yayasan, selain mendapatkan dana dari pemerintah berupa BOS/BOSDA, juga mendapat sumbangan dana dari yayasan dan iuran orang tua siswa. Lembaga penyelenggara pendidikan swasta atau yayasan penyelenggara sekolah-sekolah berasrama di Papua adalah lembaga penyelenggara pendidikan

yang didirikan oleh masyarakat dan lembaga keagamaan meliputi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) dan Yayasan Pendidikan lainnya.

2. Kondisi Sekolah Berasrama di 5 (Lima) Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua

a. Kabupaten Jayapura

Sekolah berasrama yang berada di Kabupaten Jayapura antara lain SMP dan SMA Advent, SMP Islam Terpadu (IT) Insan Cendekia, SMKN Pembangunan Pertanian, dan SMAN Kentuk Gresi, dan SMAN Yokiwa. Sekolah-sekolah tersebut ada yang dikelola swasta atau yayasan dan ada yang dikelola oleh pemerintah. Secara umum sekolah yang dikelola oleh yayasan kondisi pembelajaran, sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pengajar relatif lebih baik dibanding yang dikelola oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura hanya sebesar 25 Milyar. Dari jumlah tersebut 16 Milyar habis digunakan untuk belanja pegawai atau untuk menggaji pegawai honorer, sedangkan dana yang digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk sekolah berasrama yang ada di Kabupaten Jayapura hanya sebesar 9 Milyar. Meskipun demikian, proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut tetap harus berjalan.

1) Nilai-nilai sekolah

Kelima sekolah asrama tersebut memiliki nilai-nilai yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Untuk sekolah SMP dan SMA Advent dan SMP IT Insan Cendekia nilai-nilai yang ditonjolkan adalah nilai keilmuan dan agama. Hal ini dikarenakan kedua sekolah tersebut dikelola yayasan agama. Sementara itu, SMKN Pembangunan Pertanian menonjolkan nilai-nilai keilmuan di bidang pertanian. Sedangkan untuk sekolah SMAN Kentuk Gresi, dan SMAN Yokiwa hanya memiliki nilai-nilai dibidang keilmuan.

2) Kurikulum dan Sistem Pengasuhan

Untuk kurikulum, semua sekolah di atas sudah menggunakan kurikulum 2013. Bahkan, SMP dan SMA Advent ditunjuk sebagai pilot proyek untuk penerapan kurikulum 2013 di Kabupaten Jayapura, yang kemudian dilanjutkan dengan kurikulum berbasis SKS. Sebagai sekolah yang dikelola oleh yayasan agama, SMP dan SMA Advent serta SMP IT Insan Cendekia menggunakan kurikulum terpadu. Artinya, selain menggunakan kurikulum 2013 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah juga menggunakan kurikulum dari Kementrian Agama yang disesuaikan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Oleh karena itu, peserta didik harus bisa menguasai keilmuan agama dan akademik.

Untuk membentuk disiplin peserta didik, maka kedua sekolah asrama ini memiliki jadwal kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan antara kegiatan di asrama dan kegiatan di sekolah. Hal ini disebabkan, selain belajar akademik di

kelas/sekolah, peserta didik juga mendapatkan materi agama selama kegiatan di asrama.

Sementara itu, untuk sekolah di SMKN Pembangunan Pertanian, dan SMAN Kentuk Gresi, dan SMAN Yokiwa proses pembelajaran yang digunakan sama seperti pada sekolah-sekolah umum lainnya. Hanya saja di sekolah tersebut dilengkapi fasilitas asrama sebagai tempat tinggal peserta didik dan guru. Aktivitas di luar jam sekolah tidak seketat pada sekolah asrama yang dikelola yayasan agama. Namun demikian, baik di sekolah asrama yayasan agama maupun di sekolah umum yang berasrama, keduanya memiliki petugas khusus yang menjadi pembina asrama atau pengawas asrama. Petugas ini memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi kegiatan peserta didik selama di asrama, sehingga kegiatan tersebut bisa diarahkan ke hal-hal yang positif demi peningkatan prestasi peserta didik.

3) Sumber Daya Manusia Sekolah

Seluruh kepala sekolah dan guru di kelima sekolah ini sudah memiliki gelar minimal S1. Pertimbangan utama pemilihan kepala sekolah di provinsi Papua pada umumnya tidak jauh berbeda dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu melalui diklat calon kepala sekolah dan diangkat oleh Gubernur. Berbagai macam cara dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas kepala sekolah antara lain pelatihan manajerial, pelatihan pengembangan kurikulum, pelatihan ICT, dan lain-lain. Sementara itu, untuk guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampu. Pertimbangan penerimaan guru berdasarkan hasil tes akademik, pengalaman dan wawancara.

Mekanisme pengangkatan guru dilakukan melalui seleksi terbuka dan ada pula yang ditunjuk langsung oleh pemerintah atau yayasan.

Selanjutnya terkait dengan pembina asrama, kualifikasi yang diharapkan adalah minimal S1, sedangkan untuk pengawas sekolah kualifikasi pendidikan bisa di bawah pembina asrama. Mekanisme pengangkatan pembina asrama di sekolah berasrama di Provinsi Papua dilakukan melalui seleksi terbuka dan ada pula yang melalui penunjukkan langsung oleh kepala sekolah.

Baik kepala sekolah, guru, maupun pembina/pengawas asrama biasanya tinggal di asrama pegawai yang berada di lingkungan sekolah. Keberadaan tenaga pengajar atau guru di SMP dan SMA Advent dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu guru tetap yayasan, guru honor, dan guru PNS. Guru tetap yayasan dipilih dan angkat oleh yayasan, sehingga ia difasilitasi rumah dinas atau diberi biaya untuk sewa rumah terdekat dengan sekolah. Sedangkan untuk guru PNS dan guru honor tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Berbeda dengan SMP dan SMA Advent, SMP IT Insan Cendekia masih mengalami kesulitan dalam mencari tenaga pengajar atau guru yang berkualitas. Hal ini disebabkan, kualifikasi guru selain harus berpendidikan S1 juga harus paham ilmu agama Islam, padahal mayoritas masyarakat di Papua beragama Nasrani. Sehingga cukup sulit untuk mencari guru yang ahli agama Islam.

Untuk penerimaan peserta didik di sekolah-sekolah asrama tersebut menerapkan seleksi yang sangat longgar. Hal ini karena mereka bertujuan melayani siapapun yang berkeinginan untuk bersekolah. Bahkan hampir seluruh pendaftar diterima di sekolah.

Namun, untuk sekolah yang berstatus negeri dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, memprioritaskan untuk menerima peserta didik dari kalangan orang asli Papua. Kebijakan ini diambil agar percepatan pembangunan pendidikan bagi orang asli Papua bisa terlaksana. Sementara itu, untuk sekolah asrama yang di kelola yayasan agama tidak menggunakan kebijakan tersebut, tetapi lebih kepada kesamaan agama yang dianut masing-masing peserta didik dengan agama yang menjadi ciri khas yayasan.

4) Sarana dan Prasarana Sekolah

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah berasrama di Provinsi Papua pengadaannya dilakukan melalui pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu pengadaan sarana dan prasarana juga bisa dilakukan oleh yayasan sekolah, sumbangan orang tua, bantuan CSR dan Kementerian/lembaga lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah asrama di Kabupaten Jayapura.

Misalnya, di SMP dan SMA Advent masih memiliki permasalahan terkait daya tampung asrama dan koleksi buku perpustakaan. Sekolah ini tidak mengasramakan seluruh siswanya dikarenakan minimnya daya tampung asrama. Oleh karena itu, asrama yang tersedia dikhususkan untuk peserta didik yang berasal dari daerah yang jauh dari sekolah. Sementara itu, siswa yang rumahnya dekat diminta untuk tinggal bersama orang tuanya masing-masing.

Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di sekolah asrama SMAN Kentuk Gresi. Asrama di sekolah ini yang semula

diperuntukkan menampung peserta didik yang tempat tinggalnya jauh, malah sering kosong karena peserta didik lebih memilih pulang ke rumah meskipun jaraknya agak jauh. Hal ini disebabkan oleh kondisi keamanan lingkungan sekitar yang kurang kondusif. Oleh karena itu, asrama tersebut kemudian digunakan untuk menampung guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kasus yang lebih parah lagi terjadi pada sekolah asrama SMAN Yokiwa. Akibat masih adanya konflik hak ulayat dengan pemilik adat, proses pembangunan gedung-gedung sekolah beserta asramanya yang hampir selesai menjadi terbengkalai. Hal ini membuat pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut harus menumpang di sekolah lain.

b. Kota Jayapura

Posisi Kota Jayapura yang merupakan pusat pemerintahan maupun perekonomian di Provinsi Papua menjadikannya sebagai pusat pembangunan di Provinsi Papua. Oleh karena itu, Kota Jayapura memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Papua. Pada tahun 2015, IPM tertinggi di Provinsi Papua adalah sebesar 78,05 di Kota Jayapura, sedangkan yang terendah sebesar 25,47 di Kabupaten Nduga. Seperti halnya IPM provinsi-provinsi di Indonesia, nilai IPM tertinggi terdapat di wilayah ibukota provinsi di mana akses dan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

Tingginya nilai IPM di Kota Jayapura salah satunya didorong oleh adanya dimensi pendidikan yang lebih baik. Pada tahun 2015 indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jayapura sebesar 11,09 tahun, yang menjadi RLS tertinggi di Provinsi Papua dan

satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki nilai RLS di atas sepuluh. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 11,09 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas XI dan hampir menyelesaikan kelas XII. Begitu juga dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jayapura yang mencapai nilai 14,16 tahun, yang menjadikan Kota Jayapura dengan HLS tertinggi di Provinsi Papua.

Dengan nilai HLS Kota Jayapura yang mencapai 14,16 menunjukkan rata-rata penduduk usia tujuh tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 14,16 tahun atau setara dengan Diploma II. Hal ini tentunya memberikan gambaran pendidikan yang sudah cukup maju di Kota Jayapura jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua. Hal yang sama juga terlihat dengan adanya sekolah berasrama unggulan seperti SMAN 3 Kota Jayapura dan SMAN Olahraga yang pengelolaannya langsung dipegang oleh pemerintah Provinsi Papua.

Sekolah yang menjadi sampel penelitian di Kota Jayapura antara lain SMAN 3 Kota Jayapura, SMAN Olahraga, dan SMP Darul Ma'arif Numbay. Ketiga sekolah asrama ini memiliki visi dan misi yang berbeda, visi dan misi ini akan tercermin dari nilai-nilai yang diajarkan dalam pembelajarannya, baik di kelas maupun di asrama. SMAN 3 Kota Jayapura merupakan sekolah favorit di Provinsi Papua. Sebagai sekolah umum yang berasrama, SMAN 3 Kota Jayapura mengedepankan nilai pengetahuan. Hal ini terlihat dari berbagai kejuaran olimpiade pendidikan tingkat daerah,

nasional, dan internasional yang pernah diikuti dan bisa keluar sebagai pemenang.

Sementara itu, SMAN Olahraga Kota Jayapura cenderung mengunggulkan nilai-nilai keolahragaan dibandingkan dengan nilai-nilai keilmuan. Hal ini disebabkan SMAN Olahraga Kota Jayapura dibentuk untuk mendidik atlet berprestasi pada usia sekolah yang dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan olahraga level nasional dan internasional. Berbeda dari kedua sekolah tersebut, SMP Darul Ma'arif Numbay adalah sekolah berasrama yang mengedepankan nilai keagamaan (Islam) disamping nilai keilmuan.

Seluruh sekolah sampel telah menggunakan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum pembelajaran akademik. Bahkan, SMAN 3 Kota Jayapura merupakan sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pilot proyek pelaksanaan Kurikulum 2013. Evaluasi peserta didik di sekolah tersebut mempertimbangkan aspek ujian hasil belajar sebanyak 80 persen dan penilaian perilaku di asrama sebesar 20 persen. Meskipun menyandang sebagai status sekolah negeri unggulan, penerimaan siswa di SMAN 3 Kota Jayapura cenderung memprioritaskan peserta didik dari kalangan orang asli Papua. Hal ini terlihat dari jumlah persentase peserta didik di sekolah tersebut, yaitu 80 persen berasal dari orang asli Papua. Sedangkan 20 persen sisanya adalah peserta didik dari warga pendatang.

Dalam proses pembelajaran, SMAN 3 Kota Jayapura yang tidak mengasramakan seluruh peserta didiknya dikarenakan minimnya daya tampung asrama. Hanya peserta yang berasal dari luar kota atau wilayah pedalaman yang boleh tinggal di asrama.

Sedangkan peserta didik yang berasal dari Kota Jayapura harus tinggal di rumah masing-masing. Sekolah ini memiliki beberapa strategi dalam penanaman nilai-nilai karakter peserta didik dalam kesehariannya, seperti membiasakan hidup mandiri, menanamkan percaya diri, beribadah, mentoring, dan menanamkan rasa saling menghargai sesama penghuni asrama

Sementara itu, untuk SMAN Olahraga Kota Jayapura juga telah menggunakan kurikulum 2013 sebagai landasan proses KBM, yang penyusunannya menggunakan cara adopsi dari Pemerintah Pusat. Dalam evaluasi peserta didik, sekolah tersebut mempertimbangkan aspek ujian hasil belajar, penilaian perilaku di asrama dan peningkatan prestasi olahraga. Sekolah ini juga mengembangkan kurikulum non-akademik yang disusun oleh pelatih cabang olahraga masing-masing dengan melibatkan KONI, Dispora Provinsi, dan pelatih cabang olahraga.

Hal yang menarik adalah apabila peserta didik yang berada di sekolah tersebut tidak mampu meningkatkan prestasi olahraganya, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya untuk SMP Darul Ma'arif Numbay kurikulum yang digunakan adalah kurikulum terintegrasi, perpaduan antara Kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kurikulum yang berasal dari Kementerian Agama. Untuk non-akademik SMP Darul Ma'arif Numbay mengadopsi kurikulum pesantren dalam bentuk pembelajaran agama di asrama, bahasa (Inggris dan Arab), dan kedisiplinan.

Untuk pembinaan peserta didik selama di asrama tugas tersebut diserahkan kepada pembina asrama. Di sekolah berasrama

peran pembina asrama sangat penting, di mana tugas mereka adalah memberikan bimbingan peserta didik, membantu kesulitan belajar peserta didik, memberikan sanksi pelanggaran, dan membimbing kemandirian siswa. Ketiga sekolah tersebut sudah memberikan tugas-tugas tersebut kepada pembina asrama di sekolah mereka. Semua pengurus sekolah terutama, kepala sekolah dan guru sudah memiliki gelar minimal S1. Sedangkan untuk pembina asrama kualifikasi pendidikannya bisa dibawah guru. Khusus untuk SMAN Olahraga Kota Jayapura ada tenaga pelatih olahraga yang berkualifikasi sebagai pelatih nasional.

c. Kabupaten Keerom

Kondisi sekolah asrama di Kabupaten Keerom secara umum juga terlihat tidak terlalu terawat. Kondisi asrama di sekolah tersebut cenderung kosong. Gedung berdiri dengan baik namun tidak dimanfaatkan oleh sekolah. Hal ini diakibatkan oleh penempatan sekolah asrama yang dekat dengan pemukiman warga sekolah. Siswa dan orang tua merasa tidak perlu mengasramakan anak mereka dikarenakan tempat tinggal yang masih masuk dalam jangkauan sekolah.

Persoalan lainnya adalah terkait tidak adanya dana perawatan dan dana harian bagi penghuni asrama yang pada akhirnya menciptakan kondisi sekolah asrama yang tidak terfungsikan dengan optimal. Dibandingkan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Kabupaten Keerom masih tertinggal dalam segala hal, termasuk dalam pembangunan pendidikan. Akibat kendala kondisi geografis yang belum sepenuhnya terakses dengan baik, pembangunan pendidikan di Kabupaten Keerom menjadi terhambat. Bahkan, di beberapa wilayah yang masih pedalaman,

pembangunan pendidikan tidak bisa berjalan, seperti yang terjadi di Distrik Toe Hitam.

Distrik ini terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten Keerom dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. Meskipun di Distrik Toe Hitam sudah dibangun sebuah sekolah satu atap (Satap) SD dan SMP dengan pola asrama, tetapi aktivitas di sekolah ini tidak bisa berjalan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena kondisi geografis yang susah untuk dijangkau. Akses jalan darat untuk bisa ke Distrik Toe Hitam tidak bisa dijangkau. Transportasi yang bisa digunakan hanya pesawat perintis dengan kapasitas muatan maksimal 800 kg. *Kedua*, tidak tersedia tenaga pengajar yang cukup.

Di Sekolah SD dan SMP Satap Toe Hitam hanya tersedia tenaga pengajar untuk jenjang SD, sedangkan untuk tenaga pengajar SMP masih kosong. Pada akhirnya sekolah ini (SD) hanya sempat berjalan sebentar dan meluluskan satu kali angkatan sejumlah 6 orang. Setelah itu, sekolah SD dan SMP Satap Toe Hitam ditinggalkan oleh guru dan peserta didiknya. *Ketiga*, kondisi keamanan di lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Untuk di beberapa wilayah di pedalaman, termasuk di Toe Hitam kondisi keamanan masih rawan. Para penghuni sekolah kadang mengalami teror dari oknum-oknum yang berasal dari kampung-kampung di sekitar sekolah. Hal ini terjadi karena masyarakat di pedalaman lebih cenderung tertutup dengan warga pendatang yang menjadi guru di daerahnya. Selain itu, kesadaran mereka terhadap pendidikan masih rendah.

Kondisi lebih baik dialami oleh sekolah SD dan SMP Satap berasrama di Distrik Bompay. Meskipun masih banyak kekurangan, setidaknya pembelajaran di sekolah tersebut masih berjalan. Hanya saja bila dibiarkan dengan kondisi seadanya, maka proses pembelajaran di sekolah tersebut tidak akan berjalan maksimal. Beberapa permasalahan yang ada di sekolah SD dan SMP Satap Bompay antara lain;

- 1) Kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya. Hal ini disebabkan 1 orang kepala sekolah memimpin 2 (dua) instansi sekaligus, yaitu SD dan SMP. Harusnya masing-masing instansi ada kepala sekolahnya sendiri.
- 2) Tingginya angka mangkir tenaga pendidik atau guru. Hal ini disebabkan oleh ketidaknyamanan para guru untuk tinggal dipedalaman karena harus jauh dari keluarga dengan akses komunikasi yang susah. Selain akses jalan yang buruk, jaringan telekomunikasi dan listrik juga belum ada.
- 3) Ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Para orang tua sering membiarkan anak-anaknya pergi ke sekolah tanpa menyiapkan makanan untuk sekadar sarapan. Hal ini membuat proses belajar peserta didik terganggu, karena ketika berada di sekolah mereka sering mengeluh lapar.
- 4) Kondisi keamanan di lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Hal ini disebabkan belum adanya pagar pembatas lingkungan sekolah dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, juga belum adanya petugas sekuriti yang menjaga sekolah, sehingga orang-orang dari luar bebas lalu-lalang di

lingkungan sekolah. Bahkan, sampai mengganggu kegiatan peserta didik di asrama.

Pada akhirnya, aktivitas pembelajaran yang kondusif di Kabupaten Keerom hanya dirasakan oleh sekolah-sekolah asrama yang ada di sekitar kota kabupaten, seperti SMPN 1 dan SMAN 3 di Distrik Waris. Di kedua sekolah tersebut pembelajaran dengan pola berasrama bisa berjalan dengan baik. Bahkan, keduanya sudah bisa menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Artinya, fasilitas komputer di kedua sekolah tersebut sudah tersedia. Hal ini sudah bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur yang bagus dalam pelaksanaan pendidikan, karena di Kabupaten Keerom masih sangat jarang sekolah yang sanggup menyelenggarakan UNBK. Kebanyakan dari sekolah-sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas komputer yang memadai.

Sebagai sekolah umum yang berpola asrama, maka nilai-nilai yang dikembangkan SMPN 1 dan SMAN 3 Waris berfokus pada keilmuan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kedua sekolah berasrama tersebut sudah menerapkan Kurikulum 2013. Hanya saja fasilitas pendukungnya masih belum memadai, terutama pengadaan buku-buku penunjang pembelajaran serta buku-buku referensi koleksi perpustakaan. Sementara itu kualifikasi tenaga pengajar dan kepala sekolah di SMPN 1 dan SMAN 3 Waris sudah berpendidikan S1. Sedangkan untuk pengawas asrama juga sudah berpendidikan S1, karena diambil dari guru yang diperbantukan untuk menjadi pengawas asrama.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013, maka dalam penerimaan peserta didik, SMPN 1 dan

SMAN 3 Waris memprioritaskan anak-anak dari orang asli Papua. Seleksi penerimaan peserta didik cenderung longgar agar peserta didik yang diterima lebih banyak. Hal ini disebabkan kedua sekolah tersebut masih mencari murid, agar kuota ideal pembelajaran bisa terpenuhi. Dari segi pendanaan, semua biaya pengelolaan di SMPN 1 dan SMAN 3 Waris ditanggung dari dana BOS/BOSDA yang diambilkan dari anggaran dana Otsus.

d. Kabupaten Timika

1) Profil Kabupaten

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di wilayah pantai selatan dimana Mimika dulunya merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur.

Melihat kondisi pemerintahan saat itu dengan jumlah pegawai perwakilan kecamatan yang sangat sedikit serta luasnya wilayah pelayanan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Fak-fak memandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah Mimika yang tentunya membutuhkan perhatian dan pelayanan dari Pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Kantor Pembantu Bupati di Timika yang di tetapkan sebagai Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak wilayah Mimika oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak.

Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan meningkatnya tugas dan tanggung jawab di

bidang pemerintahan, maka dipandang perlunya pembentukan Pemerintahan Kabupaten Administratif sehingga Pemerintahan Pembantu Bupati Fak-fak wilayah Mimika di tetapkan sebagai Kabupaten Administratif, pada tanggal 8 Oktober 1996 oleh Menteri Dalam Negeri di Jayapura. Setelah terbentuk menjadi Kabupaten Administratif, maka ditetapkan wilayah Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga dan wilayah pemekaran Kecamatan Mimika Baru yang berkedudukan di Timika.

Setelah kurang lebih 4 (empat) tahun pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Administratif, maka tahun 2000 diresmikan perubahan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999. Setelah resmi menjadi Kabupaten Definitif, selanjutnya tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi menetapkan 12 Kecamatan (atau yang sekarang telah diubah menjadi Distrik) yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Distrik tersebut adalah: Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila dan Jita.

2) Sekolah Berasrama di Kabupaten Timika

(a) Jumlah Siswa

Sekolah berasrama yang dikaji di Kabupaten Mimika adalah Sentra Pendidikan berstatus negeri yang terletak di jalan Raya SP, Timika Jaya, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika Prov. Papua, melaksanakan Pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Saat ini siswa SD keseluruhan berjumlah 127 orang (80 laki-laki dan 47

wanita) yang diajar oleh 12 orang guru. Di jenjang SMP memiliki siswa berjumlah 255 orang (156 laki-laki dan 99 wanita) yang diajar oleh sebanyak 16 orang guru. Di jenjang SMA tercatat sebanyak 237 orang siswa (128 laki-laki dan 109 wanita) sedang menjalankan pendidikannya di Sentra Pendidikan.

(b) Proses Pembelajaran

Di tingkat Sekolah Dasar, saat ini tercatat memiliki rasio siswa rombongan belajar 21.17; rasio siswa guru 10.58, dengan guru kualifikasi 83,33 persen; guru tersertifikasi 25 persen; guru PNS sebanyak 33,33 persen. Di tingkat SMP, mencatat rasio siswa rombongan kelas 31.88; rasio siswa guru 15.94; guru memenuhi kualifikasi 100 persen; guru tersertifikasi 25,0 persen; dan guru PNS sebanyak 43,75 persen. Di tingkat SMA, mencatat rasio siswa rombongan kelas 28.92;; rasio siswa guru 15.77; guru memenuhi kualifikasi 100 persen; guru tersertifikasi 0,0 persen; dan guru PNS sebanyak 4, 55 persen.

(c) Sarana-Prasarana

Di tingkat Sekolah Dasar, saat ini terdapat 6 (enam) ruang kelas, atau perpustakaan sekolah, dan satu ruang sanitasi siswa. Di tingkat SMP memiliki 8 (delapan) ruang kelas, satu ruang laboratorium sekolah, satu ruang perpustakaan sekolah, dan dua sanitasi siswa. Sedangkan di tingkat SMA memiliki 18 ruang kelas, satu ruang laboratorium, satu ruang perpustakaan sekolah, dan dua sanitasi siswa. Di samping bangunan sekolah, Sentra Pendidikan Timika memiliki bangunan untuk rumah guru, asrama siswa, aula, dan sarana lain.

3) *Kondisi Sekolah Berasrama Saat ini*

Jika menyimak gambaran pendidikan Sentra Pendidikan di atas, serta pengamatan lapangan, pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan di sekolah terpadu ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahannya. Dari sisi guru, di setiap jenjang pendidikan tercatat memiliki kekurangan jumlah guru, baik berstatus PNS maupun honorer. Bahkan, guru berstatus honorer tercatat lebih besar jumlahnya dibanding guru PNS. Meski dengan perolehan honor relatif kecil dan kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, guru honorer ini memiliki harapan agar dapat diangkat menjadi guru tetap daerah.

Ada hal yang mencolok dalam penyelenggaraan pendidikan di Sentra Pendidikan, yakni: sejumlah rumah yang dibangun dan disediakan untuk tempat tinggal guru yang sebagian besar kosong dan (saat ini) mengalami rusak ringan. Dari hasil diskusi diperoleh keterangan, sebenarnya beberapa tahun lalu, sejumlah rumah itu diisi oleh guru dan keluarganya. Namun karena adanya konflik dengan masyarakat sekitar, yang berimbas pula ke lingkungan sekolah, rumah-rumah itu kemudian ditinggalkan oleh guru. Sampai saat ini hanya satu-dua rumah saja yang terisi, sedangkan lainnya kosong dan terbengkalai. Cepat atau lambat, rumah-rumah ini akan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, apabila tetap dibiarkan kosong.

Situasi lain adalah jumlah siswa yang menempati asrama yang melebihi kapasitas seharusnya. Menurut keterangan, bangunan asrama dirancang dengan kapasitas untuk 300 orang siswa, tetapi saat ini diisi oleh sekitar 500 orang siswa. Kelebihan jumlah siswa ini kemudian ditampung di salah satu aula sekolah yang

sebenarnya difungsikan untuk sarana olahraga, pertemuan, atau lainnya, menjadi tempat tinggal dan tempat berkumpul untuk makan siswa.

Kondisi asrama (terutama untuk putra) yang adapun saat ini mengalami rusak berat, dan cenderung memprihatinkan dan membahayakan. Atap asrama sudah banyak yang tidak memiliki *interknit*, bolong, dan kayu penyanggah atap sudah banyak lepas-lepas. Ironisnya, di bawah atap rusak itulah tempat tidur siswa, yang sewaktu-waktu bisa roboh mencelakai siswa. Sanitasi asrama pun sebagian besar sudah tidak berfungsi dan tidak memiliki air untuk mandi atau keperluan lain.

Bahkan hasil sidak DPRD setempat mengemukakan, bahwa “Fasilitas seperti ruang tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang belajar sangat tidak layak. Ini baru persoalan fasilitas belum kebutuhan lainnya seperti makan, air bersih, kesehatan dan perlengkapan mandi dan lain sebagainya. Anak-anak mengaku kalau mereka pakai satu handuk untuk 5 orang. Dua atau tiga orang pakai sabun satu. Di mana rasa kasihan pemerintah terhadap anak-anak asli Amungme dan Kamoro yang akan menjadi generasi penerus”.

e. Kabupaten Nabire

1) Profil Kabupaten Nabire

Pada mulanya Kabupaten Nabire masuk ke dalam wilayah Kabupaten Paniai. Mengingat beban tugas dan volume kerja yang semakin meningkat, pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam pembinaan, pengendalian, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah serta untuk

memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire; Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali; dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia.

Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka daerah Tingkat II dihapus, sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten Nabire. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya mengacu kepada, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kabupaten Nabire terletak di punggung Pulau Papua dengan luas wilayah 15.357,55 km², dan terletak diantara 134,35 BT – 136,37 BT dan 2,25 LS – 4,15 LS. Kabupaten Nabire berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut: di sebelah utara dengan Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen; di sebelah Timur dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Waropen; di sebelah Selatan dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Mimika; di sebelah dengan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. Berdasarkan data statistik kependudukan Tahun 2012, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire mencatat sebanyak 196.487 jiwa yang terdiri dari laki-laki 106.427 jiwa dan perempuan 90.060 jiwa.

2) Sekolah Berasrama di Kabupaten Nabire

Di Kabupaten Nabire terdapat beberapa sekolah berasrama, baik yang berstatus negeri maupun swasta yang dikelola oleh suatu yayasan tertentu. Terdapat 5 (lima) sekolah berasrama di Kabupaten Nabire, yaitu: SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 3, serta SMA Bupoina dan SMA YPPK Kab. Nabire. Dua sekolah berstatus swasta tersebut menyelenggarakan sekolah berasrama terpadu dari SD hingga SMA, sedangkan berstatus negeri menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SMA saja.

Khususnya SMAN 1 Nabire, semula bernama SMAN 1 KPG untuk mempersiapkan guru di provinsi Papua dengan pola pendidikan berasrama dan berkolaborasi dengan Universitas Cendrawasih bagi lulusannya melanjutkan ke Diploma-2 (D-2). Namun sejak tahun 2010, pendidikan berpola asrama untuk calon guru di SMAN 1 KPG, peraturan terkait pembinaan asrama sudah tidak ada, dan beralih menjadi sekolah konvensional. Asrama pun diperuntukkan siswa sekolah biasa, menjalani pendidikan umum, dan bukan lagi dipersiapkan sebagai calon guru.

Dari sisi sarana-prasarana, SMAN 1 Nabire sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai, antara lain: ruang kantor kepala sekolah-guru-tenaga tata usaha, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan laboratorium Bahasa, serta dilengkapi pula oleh ketersediaan lapangan bola basket, voli, peralatan musik, dan lain-lain. Pada saat ini, siswa SMAN 1 Nabire berjumlah 314 orang dengan 170 orang siswa laki-laki dan 184 orang siswa perempuan. Dari jumlah siswa itu hanya sebanyak 6 orang yang tinggal di asrama, sedangkan siswa tinggal di luar asrama bersama

orangtua, kerabat, atau orang lainnya. Di SMAN 1 Nabire terdapat 36 orang guru mengajar berbagai mata pelajaran dengan sebanyak 17 orang tenaga honorer dan 9 guru kontrak.

Sekolah lain adalah SMAN 3 yang tercakup ke dalam sekolah berasrama. Sekolah ini tergolong memiliki jumlah siswa yang besar, yakni sebanyak 865 orang siswa dengan 400 orang siswa laki-laki dan 465 orang siswa perempuan. Keseluruhan siswa terbagi ke dalam 26 rombongan belajar yang diberikan pengajaran oleh 45 orang guru dari berbagai mata pelajaran. Sebanyak 53,33 persen dari guru yang ada sudah berstatus PNS, dan sebanyak 40 orang sudah memiliki sertifikat pendidik. Namun meski kategori berasrama, dua bangunan asrama sudah mengalami kerusakan berat dan tidak berbentuk lagi, sedangkan satu lainnya masih berfungsi ditempati oleh satu keluarga guru dan dua orang siswa.

Sekolah lain yang semula menjadi fokus perhatian penelitian adalah SMAN 2 Nabire. Sekolah yang terletak di Kecamatan Wanggar ini tergolong sekolah berasrama dengan jumlah siswa sebanyak 506 orang (253 siswa laki-laki dan 253 siswa perempuan). Saat ini di SMAN 2 Nabire tercatat sebanyak 31 orang mengajar berbagai mata pelajaran, di antaranya 15 orang telah tersertifikasi, serta ditunjang oleh satu orang kepala tenaga pustakawan, dan satu orang kepala tenaga laboratorium. Sejak beberapa waktu lalu, sekolah ini juga telah mengangkat seorang tenaga pembina asrama. Bangunan asrama putera-puteri SMAN 2 Nabire yang berlokasi di bagian belakang sekolah, saat ini masih berada dalam keadaan baik dan layak pakai. Asrama dibangun sekitar dua tahun lalu dengan kapasitas 16 kamar yang masing-masing bisa di isi sebanyak 4

(empat) orang. Saat ini hanya ada 4 (empat) orang siswa putri yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) *Kondisi Sekolah Berasrama di Kabupaten Nabire*

Dari sekolah berasrama di atas, mungkin hanya sekolah berstatus swasta yang keseluruhan siswanya bertempat tinggal di asrama. Siswa mereka merupakan putra daerah yang berasal dari pedalaman, baik sedang menjalankan pendidikan di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah swasta ini memperoleh bantuan anggaran dari sebuah organisasi tertentu, di samping menarik iuran dari siswa mereka sebesar Rp. 200 ribu setiap bulannya.

Sebaliknya sekolah-sekolah berstatus negeri di atas, memiliki siswa yang tinggal di asrama relatif sedikit. Asrama seolah-olah kurang diminati oleh siswa lulusan SMP di sekitar untuk menjalankan pendidikannya di sana, padahal sekolah-sekolah tersebut terkategori baik di wilayahnya. Kami sendiri awalnya bertanya, mengapa demikian? Mungkin disebabkan sekolah berasrama tidak memberikan perlakuan khusus terhadap siswa-siswa tergolong kurang mampu, berasal dari daerah pedalaman, dan ingin tinggal di asrama dalam menjalankan pendidikannya. Dugaan ini diperkuat dengan tersendatnya bantuan yang diterima sekolah untuk mengelola hal yang berkaitan dengan kehidupan berasrama, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup siswa. Menurut informasi yang diterima, di SMAN 2 Nabire hanya pernah sekali menerima bantuan berupa beras dari pihak tertentu.

Menurut kami, fenomena di atas memerlukan suatu penelitian yang lebih mendalam dengan waktu di lapangan relatif memadai.

Dugaan kami sementara, mungkin putera daerah lulusan SMP yang jauh dari perkotaan ataupun tinggal di pedalaman tidak berminat untuk melanjutkan pendidikannya disebabkan oleh sesuatu hal, misalnya latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu. Tentu ketiadaan biaya akan menjadi kendala bagi anak lulusan SMP untuk bersekolah di daerah perkotaan, baik untuk keperluan membayar iuran sekolah, transportasi, dan sebagainya. Keinginan melanjutkan pendidikan lebih tinggi akan sulit tercapai apabila tidak didukung oleh bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dugaan lain adalah mungkin keluaran SMP itu memang belum ada, sehingga input siswa untuk bersekolah di sekolah berasrama memang nihil. Lalu, apa gunanya membangun sekolah berasrama tersebut apabila tidak didasarkan atas antisipatif dan perencanaan kerja yang matang? Hal itu hanya merupakan pemborosan biaya: sekadar membangun asrama di sekolah tanpa audiens yang jelas.

C. Sekolah Berasrama sebagai Media Integrasi Kebangsaan

Masyarakat Papua dengan suku bangsa dan tradisi yang berbeda, memiliki kecenderungan konflik antar-suku yang cukup tinggi. Keberadaan sekolah berasrama di Papua, selain menjadi sebuah jawaban atas akses dan mutu pendidikan, juga sebagai wahana integrasi sosial kebangsaan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di beberapa sekolah berasrama di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura, dapat diketahui bahwa keberadaan sekolah berasrama sangat mendukung terciptanya integrasi sosial kebangsaan. Integrasi sosial selalu diupayakan menjadi pendidikan karakter

dalam pembelajaran di sekolah berasrama. Para siswa di sekolah berasrama berasal dari berbagai suku di Papua.

Oleh karena itu, pertemuan siswa dari suku bangsa yang berlainan memungkinkan mereka untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi yang lebih tinggi. Selama berada di sekolah dan asrama mereka bisa menjalin hubungan dengan baik tanpa terjadi konflik. Dengan cara ini solidaritas pergaulan sehari-hari siswa di sekolah berlangsung dengan baik serta saling menghargai satu sama lain tanpa memandang asal usul suku bangsanya. Selain itu keberadaan sekolah berasrama juga sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didiknya. Selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah berasrama para siswa dikenalkan dengan wawasan kebangsaan Indonesia. Mereka diajarkan untuk mengenal nama-nama daerah dan suku bangsa yang ada di Nusantara. Keragaman kondisi masyarakat di Nusantara dianggap sebagai rahmat, kekayaan, dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Keragaman tersebut wajib dijaga dan dipelihara oleh semua pihak, demi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Dengan demikian, para siswa dapat memahami bahwa perbedaan budaya dan adat bukanlah merupakan hambatan untuk menjalankan keharmonisan hidup bersama sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pada akhirnya poin kedua dari pendidikan karakter tersebut menjadi modal dasar bagi terciptanya integrasi sosial kebangsaan. Proses integrasi tersebut juga didukung oleh penggunaan bahasa Indonesia secara luas di wilayah Papua. Sebagai daerah dengan beragam suku bangsa, Papua memiliki lebih dari 250 bahasa daerah. Hal ini bisa menjadi kendala komunikasi,

sehingga rentang menimbulkan gesekan sosial atau konflik. Akan tetapi, dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat Papua, kendala komunikasi bisa diminimalisir. Selanjutnya, beragam konsep pembangunan di bidang pendidikan bisa disampaikan dengan baik demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Papua.



Salah satu kunjungan di sekolah asrama di Nabire

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua saat ini masih rendah dan tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang jelas antara daerah Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Permasalahan akses pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta guru dan tenaga pengajar, merupakan tantangan bidang pendidikan yang dihadapi Provinsi Papua. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah pendirian sekolah berasrama untuk meningkatkan kualitas mutu dan akses pendidikan di Papua. Sekolah berasrama menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan akses pendidikan yang disebabkan oleh keterisolasian wilayah pedalaman Papua. Sekolah berasrama dapat menampung siswa yang berasal dari kampung-kampung di wilayah pedalaman Papua.

Pendidikan sekolah berasrama merupakan perpaduan antara pendidikan yang dilakukan di sekolah dan di asrama, di mana siswa menjalani proses belajar dan bermain di sekolah, lalu sepulang dari sekolah mereka akan belajar dan tinggal di asrama dengan para pengasuh yang berfungsi sebagai guru dan orang tua. Melalui pendidikan berasrama ini, anak-anak akan dididik dan dikontrol

perkembangan hidupnya secara langsung, kontinu, dan mendalam. Dengan demikian, kualitas dan kuantitas pendidikan anak-anak di Provinsi Papua bisa meningkat.

B. Rekomendasi

Pengembangan sekolah berasrama masih memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Hingga saat ini pengembangan sekolah berasrama masih menerapkan metode lama, yaitu sekolah berasrama dikembangkan di daerah terpencil mendekati dengan pemukiman penduduk yang berada di pedalaman. Harapannya agar masyarakat atau peserta didik mudah mengakses lokasi sekolah.

Namun, strategi ini memiliki banyak kekurangan. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan membuat monitoring dan evaluasi sekolah terkendala akses. Hal ini juga menyebabkan tingginya angka mangkir guru. Para guru jarang ditemukan di sekolah karena biaya hidup di daerah terpencil relatif mahal. Selain itu, di beberapa daerah terpencil kondisi keamanan masih rawan, sehingga siswa tidak mau tinggal di asrama sekolah dan lebih memilih pulang. Dengan demikian fungsi asrama tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil diskusi dari para pemangku jabatan di bidang pendidikan, telah dihasilkan beberapa pemikiran yang bisa dijadikan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. *Pertama*, seharusnya sekolah berasrama dibangun di wilayah perkotaan atau di daerah yang memiliki akses bagus, seperti pusat pemerintahan di kabupaten dan kecamatan. Dengan strategi ini, diharapkan monitoring dan evaluasi sekolah lebih mudah, serta biaya

operasional sekolah yang relatif murah. Selain itu, peserta didik harus tinggal di asrama yang disediakan oleh sekolah, karena mereka jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi ini pada akhirnya membuat fungsi asrama bisa optimal, sehingga asrama bisa dimanfaatkan sebagai wahana integrasi antar suku.

Kedua, sekolah berasrama dikembangkan di 5 (lima) wilayah adat Papua, yaitu Saireri, Mamta, Lapago, Haanim, dan Meepago. Harapan dari strategi ini antara lain; (1) Mengurangi beban sekolah asrama yang terpusat di kota Jayapura; (2) Pemerataan porsi anggaran pendidikan; (3) Siswa tidak terlalu jauh dari tempat tinggal; (4) Pemanfaatan guru dan tenaga pengajar lokal lebih optimal; dan (5) Kurikulum kontekstual lebih memungkinkan untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analytical And Capacity Development Partnership (ACDP). 2014. *Studi Perencanaan Strategis Percepatan Pendidikan Dasar di Pedesaan dan Daerah Terpencil di Tanah Papua 2014*. Jakarta: ACDP.
- Anderson, Bobby. 2013. *The Failure of Education in Papua's Highlands*. Diakses melalui: <http://www.insideindonesia.org/the-failure-of-education-in-papua-s-highlands>.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Ika, Aprilia. 2018. "Bappenas dan IASA Kembangkan Sekolah Pola Asrama di Papua dan Papua Barat". *Kompas*, download 18 Februari 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2015-2019*. Jakarta: Naskah tidak dipublikasikan.
- Maksudin. 2008. "Pendidikan Nilai *Boarding School* di SMPIT Yogyakarta", *Disertasi UIN Sunan Kalijag*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Modouw, James. 2010. "Menghitung Kontribusi Pembangunan Pendidikan Bagi Manusia Papua" dalam *Simposium & Lokakarya Nasional Papua*, Fisip UI.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nenobais, Harry. 2012. "Pengembangan Pendidikan Berbasis Asrama di Pedalaman Papua" dalam *Proceeding Seminar dan*

Lokakarya Membangun Optimisme di Tanah Papua, Belajar dari Praktik Baik Pelayanan Publik. Yogyakarta: Dies Natalis Fisipol UGM ke-57.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perdana, Novrian Satria, dkk. 2017. *Laporan Akhir Penelitian Sekolah Berasrama*. Jakarta: Puslitjaldikbud, Balitbang, Kemendikbud. Naskah tidak diterbitkan.

Purwoko, Bambang, dkk. 2015. *Studi Pengembangan Pendidikan Berpola Asrama Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015*. Yogyakarta: PPKK UGM.

Sukmadinata, Nana Syaodih, dkk. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (konsep, prinsip, dan instrument)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Utama, Bakti, dkk. 2017. *Laporan Penelitian Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud. Naskah hasil penelitian tidak dipublikasikan.

Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK), UGM. 2016. *Grand Desain Pembangunan Pendidikan Kabupaten Intan Jaya 2017 – 2037*. Yogyakarta: PPKK.

Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: FES.

Yusuf, Choirul Fuad. 2008. *Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan*. Jakarta: PT. Pena Citrasatria.

Keterbatasan akses dan rendahnya mutu pendidikan, telah membuat pembangunan pendidikan di Papua jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain Indonesia. Secara umum, setidaknya terdapat dua permasalahan besar di bidang pendidikan di Papua. Permasalahan pertama adalah relatif rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di Provinsi Papua. Persoalan kedua adalah rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Untuk itu, diperlukan strategi kebijakan untuk segera mengatasi persoalan pendidikan di Papua. Sekolah berasrama merupakan salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan pencapaian pembangunan pendidikan di Papua. Sekolah berasrama diharapkan mampu mengatasi permasalahan berkaitan dengan keterbatasan akses dan mutu pendidikan. Pendidikan sekolah berasrama merupakan perpaduan antara pendidikan yang dilakukan di sekolah dan di asrama, dimana siswa menjalani proses pembelajaran secara utuh dari belajar, bermain, dan mendapatkan berbagai keterampilan hidup. Melalui pendidikan berasrama ini, anak-anak akan dididik dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung, berkelanjutan, dan mendalam. Dengan demikian, melalui sekolah berasrama, diharapkan kualitas dan kuantitas pendidikan anak-anak di Provinsi Papua dapat meningkat.



Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

ISBN 978-602-0792-54-5

